

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI HUTAN PINUS PENGER PADUKUHAN SENDANGSARI KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Joan Ernesto Wairo

NIM 20510022

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

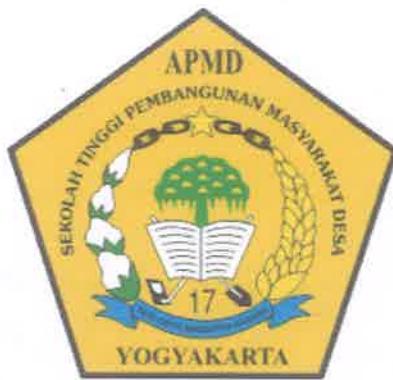
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI HUTAN PINUS PENGER PADUKUHAN SENDANGSARI KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

Joan Ernesto Wairo
NIM 20510022

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

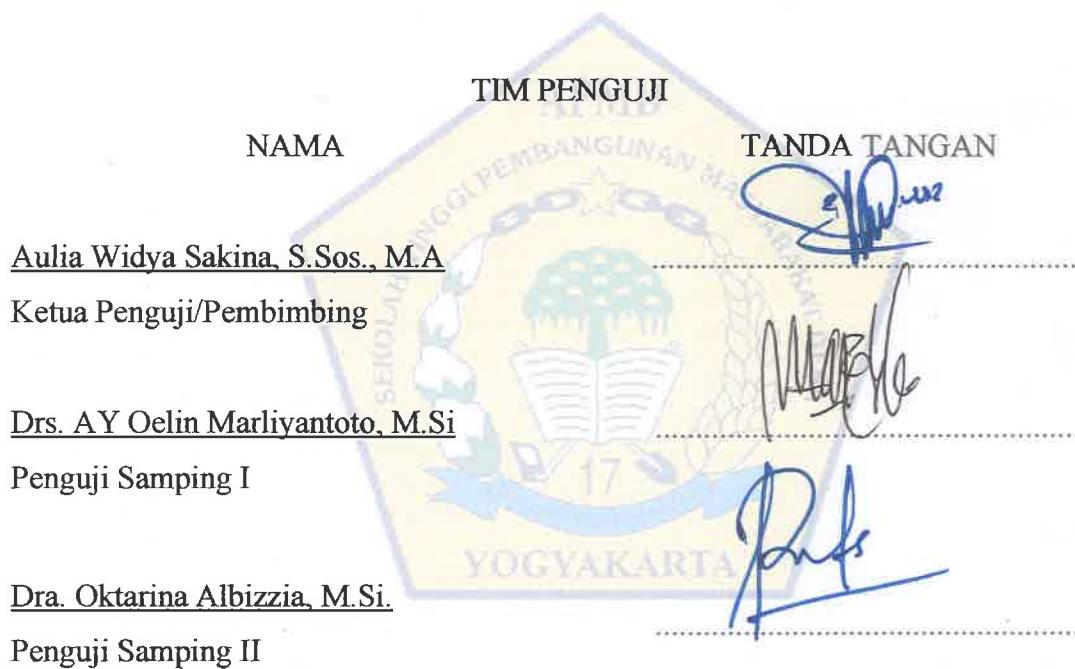
2024



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Pengaji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu, 7 Agustus 2024
Jam : 12.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial

YOGYAKARTA

Dra. MC. Andra Rusmala Dibyorini, M.Si.

NIY 170 230 173

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Joan enesto wairo
NIM : 20510022
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI HUTAN PINUS PENGGER PADUKUHAN SENDANGSARI KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogjakarta 6 Agustus 2024
Yan

Joan enesto wairo
NIM. 20510022

MOTO

“Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa., yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba ia akan memberikan kepada jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

(Korintus 10:13)

“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam diri (self reliance), maka seluruh alama semesta akan bahu membahu mewujudkannya”

(Ir.Soekarno)

“Manusia harusnya ia menjadi tamansari bagi bagi manusia lainnya”

(Joan Ernesto Wairo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk terus berjuang dan berkarya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Gerson Wairo dan Mama Yulistina Piga Terimakasih atas segala dukungan, motifasi dan perjuangan serta doa-doa. Dengan doa dari Bapak dan Mama saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan penuh semangat.
2. Saudara saya, Gita Monica Kristiani, Stefano Luis Alfredo Wairo, Gema Gita Nasrani Wairo
3. Keluarga Besar saya, Tete, Nenek Geraon Wairo, Almarhum Rince Wairo, Gen Wairo, Ento Waito, dan Lice Wairo, Yulistina Piga, Andar Wairo, Dikson Itang, Ardon Itang, Almarhum Susi Itang, Richard Itang, dan Widya Itang.
4. Sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan masukan selama peneliti melakukan kajian lapangan. Dari diskusi-diskusi kecil yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif yaitu Muamar Ali, Richat Itang, Joko Sulistiyo, Gabriel Mangacu, Hendra Mangaginge, Stenli Makaginge, Erwin Wadui, Krisman Burnama, dan keluarga besar KPMG
5. Seluruh teman-teman civitas akademik program studi pembangunan sosial yang telah berperan dalam setiap dinamika kampus, berkontrobusi secara pikiran kritisnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Atas berkat dan kasih-Nya yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi dengan Skripsi yang berjudul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI HUTAN PINUS PENGGER PADUKUHAN SENDANGSARI KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA”. Skripsi tersebut disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Saya menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi perjuangan intelektual dengan dukungan dari orang tua, saudara, dan teman-teman akademik. dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si. Ketua Program Studi Pembangunan Sosial STPMD “APMD” Yogyakarta
4. Ibu Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing saya yang bersedia membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir sampai selesai.
5. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani, memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimba ilmu di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
6. Pemerintah Kelurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah bersedia membantu, dan mempermudah saya selama penelitian.
7. Kepada setiap informan dan masyarakat Kelurahan Dlingo sebagai narasumber serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah membantu

dan mempermudah dalam memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penilitian.

8. Kedua orang tua saya Bapak Gerson Wairo dan Mama Yulistina Piga yang telah memberikan semangat, fianasial, serta doa-doa yang mengantarkan saya pada titik ini.

Penulis memahami bahwa dari awal penulisan, kegiatan lapangan, sampai pada penyusunan data dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan baik itu isi yang disampaikan maupun cara penyajian data oleh peneliti. Dari itu, sehingga peneliti selanjutnya dapat menjadi catatan dan acuan dalam melakukan studi kajian. Semoga karya saya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis



Joan Ernesto Wairo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penilitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori	9
1. Pengertian Pemberdayaan	9
2. Pengertian Masyarakat	11
3. Pariwisata	17
E. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Fokus Penelitian	21
3. Subyek Penelitian.....	21
4. Obyek Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data	22

a. Observasi	22
b. Wawancara	23
c. Dokumentasi.....	23
6. Teknik Analisis Data.....	24
a. Reduksi Data	25
b. Penyajian Data.....	25
c. Verifikasi Data	25
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	27
A. Sejarah Desa Terong.....	27
B. Keadaan Geografis Desa Terong	28
C. Keadaan Demografis.....	29
a. Jumlah Penduduk	29
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
c. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	33
D. Keadaan Sosial dan Ekonomi	34
1. Kondisi Sosial	34
2. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Terong	36
3. Tingkat Kemiskinan Masyarakat Desa Terong Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)	37
E. Profil Kelompok Sadar Wisata Pinus Pengger (POKDARWIS).....	39
F. PROFIL WISATA PINUS PENGGER	42
1. Latar Belakang	42
2. Data Pengunjung dan Pendapatan Wisata Pinus Pengger.....	45
BAB III HASIL DAN ANALISIS DATA	50

A. Deskriptif Informan	50
B. Pemberdayaan Masyarkata Berbasis Pariwisata.....	50
1. Menciptakan suasana kondusif di masyarakat (enabling).....	65
2. Bimbingan dan dukungan (<i>supporting</i>)	75
C. Pengelolaan Pariwisata	80
D. Manfaat Pariwisata bagi Masyarakat	90
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
PEDOMAN WAWANCARA	105
DOKUMENTASI PENELITIAN	108
PERMOHONAN IJIN PENELITIAN	110
SURAT TUGAS PENELITIAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Luas Wilayah Menurut Penggunaannya	28
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	30
Tabel 2. 3 Data Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	32
Tabel 2. 4 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	33
Tabel 2. 5 Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Terong	36
Tabel 2. 6 Data Tingkat Kemiskinan KK DesaTerong.....	38
Tabel 2. 7 Sususn Pengurus Kelompok Sadar Wisata	40
Tabel 2. 8 Data Pengunjung dan pendapatan	45
Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian	50
Tabel 3. 2 Data Pendidikan di Kalurahan Terong.....	56
Tabel 3. 3 Data Kesejahteraan Masyarakat	71
Tabel 3. 4 Data Tingkat Kemiskinan Desa Terong.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan potensi alam yang berlimpah yang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Didalam UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa kekayaan alam yang dimiliki harus diserahkan kepada negara untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-bailnya. Selanjutnya potensi diantaranya kekayaan laut, minyak, emas, perak, batu bara, hutan, tumbuhan dan hewan yang dilindungi menjadi kekayaan alam yang harus dijaga dan dirawat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki daya tarik sendiri dibidang wisata alam dan budaya. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan sistem sosial yang menguntungkan dengan latar belakang suku, ras, adat dan budaya yang pluralistik, maka dikenal sebagai negara kepulaian. Selain sebagai negara kepulaian Negara Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris dan maritim sejak masa penjajahan. Terbukti sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang ketahanan pangan negara artinya dari sisi ini, dipahami bahwa hasil pertanian mampu menjadi bagian dari ketahanan nasional. Begitupun juga sebagai negara maritim dengan kekayaan laut nya yang melimpah Misalnya dimasa Pemerintahan Joko Widodo selama dua periode selalu memberikan sinyal kepada kepada beberapa kementerian yang bertanggungjawab terhadap sektor pertanian dan kelautan serta masyarakat Indonesia bahwa pentingnya ketahanan pangan kedepannya karena dunia sedang menghadapi krisis iklim yang

berkepanjangan disebabkan oleh hutan Indonesia yang hari ini telah dijadikan lahan bisnis oleh korporat negara.

Hutan di Indonesia selain sebagai sebagai paru-paru dunia dengan hutan hujan tropisnya juga telah memberikan sumber kehidupan bagi makluk hidup didalamnya. Hutan menghasilkan oksigen, air, dan menjadi tempat berlindung bagi flora dan fauna. Sehingga hutan menjadi salah satu objek penting yang harus dijaga dirawat oleh negara dan hal ini juga merupakan perhatian dunia sejak iklim panas menyerang berbagai negara termasuk Indonesia. Keberadaan hutan tidak hanya kepentingan keberlangsungan hidup tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indoensia dengan daya tarik terhadap hutan dan makluk hidup didalamnya.

Menurut catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun ke tahun perolehan devisa dari bidang pariwisata terus mengalami peningkatan. Perolehan devisa pada tahun 1993-1994 sebanyak 3.984,7 juta, sedangkan pada tahun 1996/1997 meningkat menjadi 6.406,0 juta. Begitu juga dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2000 tercatat 5.364.117 jiwa wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sedangkan pada tahun 2003 meningkat sebanyak 299.900 jiwa menjadi 5.364.117 jiwa wisatawan. Secara kumulatif Januari-Agustus 2018 jumlah kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) ke Indonesia mencapai 10,58 juta kunjungan atau naik 12,30 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama, tahun 2017 yang berjumlah 9,42 juta kunjungan.

Namun kini kunjungan wisatawan ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Desember 2021 berjumlah 163.619 kunjungan mengalami penurunan sebesar -0,28% dibandingkan bulan desember tahunan 2020 berjumlah 164.079 kunjungan adapun penyebab penurunan itu sendiri dikarnakan wabah covid 19.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Indonesia terbukti salah satu negara yang menjadi incaran wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. selain itu juga, banyaknya pengunjung wisatawan yang berkunjung di Indonesia dari tahun-ketahun secara tidak langsung telah membantu mendongkrak pemasukan baik pusat maupun daerah. Sehingga sampai saat ini baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah terus mendorong dan mensuport agar pengembangan wisata di setiap daerah terus dikembangkan seperti daerah Papua, NTT, Lombok, DIY dan masih banyak daerah lain lagi.

Belakangan ini Pemerintah Indonesia baik Pusat maupun Daerah terus berupaya mendorong agar setiap daerah yang memiliki potensi wisata terus dikembangkan. Langkah ini dapat kita ketahui sebagai langkah strategis agar dapat menyerap tenaga kerja sekaligus membuka isolasi kesenjangan ekonomi masyarakat. Disisi lain, pengembangan pariwisata dengan konsep melibatkan masyarakat secara aktif bermaksud untuk menjadikan masyarakat sebagai actor utama yang akan menerima manfaat dari program pariwisata tersebut agar dapat membantu dan menunjang pendapatan ekonomi masyarakat dipedesaan. Dilain sisi, konsep dengan melibatkan masyarakat tersebut sebagai upaya untuk mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke

kota akibat dari keterbatasan peluang pekerjaan. Sehingga masyarakat lebih banyak memilih mencari hidup di kota dibandingkan di desanya sendiri.

Berdasarkan UU No.10/2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah sebuah wisata dengan kelengkapan fasilitas wisata yang diwadahi oleh masyarakat dengan daya dukung dari Pemerintah Pusat secara vertikal. Artinya, hadirnya pariwisata dengan yang berbasis alam yaitu wisata cagar alam memberikan daya tarik sendiri bagi pengunjung dan aktivitasnya dijaga, dilindungi kelestariannya oleh pemerintah. Sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Nyoman S. Pendit tentang jenis pariwisata, wisata cagar alam adalah wisata yang mempunyai hubungan dengan hutan lindung, pegunungan, dan taman lindung yang menawarkan keindahan sendiri yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Seperti yang dapat ditemukan oleh peneliti di Dusun Sendang Sari, Kabupaten Bantul yaitu Wisata Pinus Pengger mengelola wisata alam yaitu pohon pinus yang menawarkan keindahan alam dan fasilitas yang memadai yang diwadahi oleh masyarakat setempat melalui kerjasama.

Pembangunan dan pengelolaan pariwisata merupakan upaya peningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal dengan pertimbangan dapat mampu memberikan dampak positif dan dilaksanakan sesuai dengan budaya setempat. Undang-undang No 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memperhatikan potensi lokal. Dalam (Argyo Demartoto, 2009), Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat pengelolaan potensi oleh daerah dengan memberikan kebebasan dan keluasa

kepada masyarakat untuk menentukan nasib agar terberdaya dan mempunyai daya saing. Kemudian pembangunan desa wisata yang berbasis potensi lokal memerlukan kepedulian sumber daya dan partisipasi masyarakat dengan tujuan memberikan dukungan dengan ikut mengambil bagian dalam pengelolaan , terutama desa wisata dengan pemanfaatan potensi lokal. Karena dalam pengelolaan dan pengembangan wisata lokal perlu kesepahaman bersama tindakan dari demokrasi lokal.

Salah satu daerah yang terus mengembangkan potensi wisata dengan melibatkan masyarakat lokal adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan objek wisatanya adalah wisata Pinus Pengger di Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini wisata Pinus Pengger sebagai Desa wisata karena memiliki potensi yang menarik untuk dikunjungi. Wisata Pinus Pengger terletak di atas bukit dengan tempat yang asri, juga menyuguhkan kecantikan alam pegunungan dan persawahan serta menikmati pemandangan kota Yogyakarta di saat siang hari maupun malam hari.

Wisata Pinus Pengger merupakan bagian dari wilayah kelola Resort Pemangku Hutan (RPH) mangunan yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata dengan membangun kerjasama bersama masyarakat dan tentu meningkatkan ekonomi masyarakat. Pergub DIY Nomor 48 tahun 2016 tentang Jasa Layanan Wisata di Kawasan RPH Mangunan, RPH Mangunan sekarang ini dibagi menjadi 7 blok yaitu blok Terong, Sudimoro I, Sudimoro II, Sudimoro III, Gumelem, Kediwung dan Ceme. Objek wisata yang di kelola RPH Mangunan yaitu Puncak Becici, Bukit Panguk Kediwung, Bukit

Mojo Gumelem, Pinus Asri, Pinus Sari, Seribu Batu Songgo Langit, dan Pinus Pengger. Hutan Mangunan merupakan menjadi Kawasan hutan lindung yang di kelola oleh RPH Mangunan berdasarkan Peraturan Daerah No 36/2008 dan peraturan Gubernur No. 40/2008 Balai KPH (diperbarui dengan Peraturan Gubernur No. 39/2018), dengan ini menetapkan KPH sebagai UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Sebagai UPTD, Balai KPH Yogyakarta bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (saat ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), yang merupakan unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja berupa Bagian Daerah Hutan (BHD). Penetapan KPH sebagai UPTD sebagai kepanjangan tangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memperjelas pemisahan fungsi administrasi/pengurusan dan fungsi bestur pengelolaan (R.Itang ;2021;2-3).

Pengembangan ekowisata hadir melalui keberadaan tegakan pinus yang sudah tidak disadap karena tegakan sudah tua dan rendah produktivitas getahnya. Tegakan pinus mempunyai kondisi alam yang indah dan berlokasi di daerah pegunungan, sehingga menarik dan potensi untuk dikelola dan dikembangkan menjadi wisata alam.

Sesuai dengan Perda DIY No.7/ 2015 dan Peraturan Gubernur DIY No. 84/2016 yang selanjutnya diperbarui menjadi Peraturan Gubernur DIY No. 5/2018 tentang kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya, pengelolaan Wisata Alam Mangunan dikerja samakan dengan masyarakat setempat. Konsep yang diusung dalam pembangunan Wisata Alam

Mangunan adalah Ekowisata dengan mendorong potensi budaya setempat, yang merujuk pada Grand Design Wana Wisata Mataram yang telah dibuat oleh KPH Yogyakarta.

Pengelolaan Alam Mangunan menjadi objek wisata merupakan peluang bisnis baru bagi KPH, pelibatan KPH Yogyakarta sebagai upaya penyederhanaan birokrasi, dengan terbitnya Peraturan Gubernur No. 5/2018 yang khusus membahas mengenai kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan perizinan pemanfaatan Taman Hutan Raya. Pada perjanjian kerja sama bahwa nilai bagi hasil sebesar 75 % untuk Koperasi dan 25 % untuk Pemerintah, model pengelolaan dengan pemberdayaan, KPH Yogyakarta tetap memberikan akses pemanfaatan lahan bagi masyarakat sekitar hutan. Kegiatan tumpangsari dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan diperkirakan mampu memberikan kontribusi penambahan penghasilan masyarakat sebesar 30 Milyar rupiah dan dapat menyerap tenaga kerja 9.000 orang.

Berdasarkan penelitian (Aji Sukmono B Nurjaman, 2016) PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. PAD di sektor pariwisata pada tahun 2012 sebesar Rp,12.529 miliar dengan proporsi PAD 8,18%. Kemudian tahun 2016 mengalami peningkatan pesat yaitu 19,8% menjadi Rp,21.901 miliar dengan PAD 6,2%. Kawasan wisata yang sering dikunjungi wisatawan adalah wisata di daerah RPH Mangunan yang merupakan Kawasan hutan lindung. RPH mangunan mempunyai potensi sebagai lembaga yang mengembangkan pariwisata karena dapat membantu menunjang perekonomian masyarakat.

Bahkan ketika pandemi covid 19 ditahun 2020-2022 mereka masih tetap bisa bertahan menjalankan aktivitas wisata dengan protokol kesehatan yang ketat, meskipun jumlah kunjungan mengalami penurunan drastis serta sempat mengalami stagnasi pengelolaan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa sejak tahun 2015 kelompok sadar wisata sebagai pengelola wisata Pinus Pengger, kelompok tersebut terus melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata dengan melakukan revitalisasi terhadap terhadap fasilitas objek wisata terutama kebutuhan sanitasi dan kuliner. Berbagai macam fasilitas wisata terus dibangun seperti spot foto, jasa foto dan rumah makan. Pelibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata sebagai upaya keberdayaan masyarakat dengan membuka peluang pekerjaan untuk kepentingan peningkatan aktivitas ekonomi dilingkungan wisata.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Wisata di Dusun Sendang sari, Kalurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Pinus Pengger di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penilitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dengan adanya pariwisata

2. Manfaat Penelitian

Untuk menambah wawasan dan pendalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki terutama pembangunan sosial

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut (Ambar Teguh S. 2004: 78) memaknai pemberdayaan antara lain. “Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti tenaga, upaya, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Selain itu juga pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris “*empower*” yang menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary mengandung dua pengertian. Pertama, adalah *to give power or authority to/* memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; Kedua, yaitu *to give ability to or enable/* upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.”

Pemberdayaan menurut David Korten dalam (Moeljarto, 1987: 25) adalah sebagai upaya keberdayaan kepada kaum kecil agar mampu mandiri dan tidak tergantung dengan kebijakan politik yang bebas sehingga dapat membawa kemanfaatan. Menurut Chatarina Rusmiyati (2011: 16), pemberdayaan adalah cara bermasyarakat, berorganisasi, dan berkumpul

dalam komunitas agar menjadikan seseorang kuat dalam berpartisipasi terhadap pengaruh lingkungan yang membangun.

Pemberdayaan merupakan salah satu “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses transfer pengetahuan melalui komunikasi dialogis antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta membangun peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya sosial ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sri Kuntari (2009:12) proses pemberdayaan meliputi *enabling/* menciptakan dan membangun suasana kondusif, *empowering/* penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, *supporting/* bimbingan dan dukungan, *forestsing/* memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang.

Pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses Pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga dapat dikatakan mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna yaitu: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko,

mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang mengarah pada usaha menumbuhkembangkan akal pikiran masyarakat dengan melaksanakan suatu pembaruan yang bertujuan untuk membentuk suatu individu yang berdaya. Maka konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara structural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka memegang kontrol/kendali atas diri dan lingkungannya. Pentingkah pemberdayaan bagi masyarakat?

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konfensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Menurut Koentjaraningrat (2009: 115-116) mengartikan masyarakat (society) dan bahasa latin *socius* yang artinya kawan. Kemudian dalam bahasa arab “syaraka” atau kawan yang artinya ikut berpartisipasi. Dalam hal ini masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dan membutuhkan. Definisi

lainnya masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009: 117) adalah kesatuan hidup manusia dengan aktivitas sosial menurut adat dan kultur budaya tertentu yang terikat karena rasa kebersamaan dan bersifat kontinyu. Ia mengungkapkan ciri-ciri kontinyu sebagai berikut: adat istiadat, kontinuitas waktu, dan rasa identitas yang sama.

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Diartikan sama dengan hidup dalam sebuah tatanan masyarakat yang dihadapkan dengan berbagai aktivitas kerjasama yang saling mendorong untuk bertahan hidup. Mac Iver dan Page (Soerjono Soekanto 2006: 22) memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu system atas kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, golongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama yang didorong oleh tindakan bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (Soerjono Soekanto 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup Bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunya kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Berdasarkan beberapa pengertian masyarakat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunya kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh persamaan. Adapun perbedaan kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.

a. Kehidupan Masyarakat Wisata

Kebijakan pembangunan Pariwisata nasional mengupayakan untuk mendorong masyarakat dan pelaku disektor kepariwisata dalam mencapai sasaran yang digariskan dan tujuan yang ditetapkan bersama. Pariwisata dapat diyakini sebagai sektor andalan yang mampu memberi kontribusi sosial ekonomi ditingkat masyarakat lokal maupun negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga sektor pariwisata masih layak dan penting untuk dikembangkan sebagai media meningkatkan ekonomi masyarakat.

Perkembangan Pariwisata Indonesia secara menyeluruh merupakan hasil kerja berbagai pihak antara lain Pemerintah, swasta dan masyarakat. Kebijakan pembangunan pariwisata nasional merupakan upaya untuk mendorong pelaku di sektor kepariwisataan dalam mencapai sasaran yang digariskan dan tujuan yang ditetapkan. Pariwisata merupakan bisnis yang sangat besar dan Indonesia mempunyai peluang untuk memainkan peranan didalamnya. Dengan potensi wilayah tanah air yang terdiri dari belasan ribu pulau dan ratusan variasi adat dan budaya yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri, maka pariwisata akan tumbuh menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan dan memiliki prospek yang sangat cerah dikemudian hari bagi pembangunan Nasional. Pariwisata dapat menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha menumbuhkan kebudayaan dan kesenian dan bagi wisatawan domestik dan pariwisata itu berguna untuk mengash rasa cinta tanah

air dan meningkatkan disiplin Nasional. Pariwisata adalah system multi kompleks dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama. Salah satu aspek penting dalam pembangunan pariwisata adalah aspek sosial budaya. Karena pariwisata dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik apabila didukung dengan pariwisata budaya yakni dilihat dari aspek budaya.

Dampak dari pembangunan pariwisata sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat wisata. *Pertama*, dampak sosial yang terjadi setelah adanya pariwisata berdasarkan teori (Gracia, 2015; Woosnam, 2018) bahwa pariwisata memiliki pengaruh pada sejumlah atribut sosial kultural seperti kebiasaan masyarakat, adat istiadat, nilai-nilai, kepercayaan, dan gaya hidup penduduk di daerah destinasi wisata. Sedangkan menurut Dwi Heru Sukoco (1995) dalam Renaldi Rakhman Luthfi (2013), bahwa kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. *Kedua*, dampak ekonomi, bisa dilihat bahwa dengan adanya pariwisata, masyarakat yang awalnya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian, kini masyarakat terlibat langsung dalam mengelola wisata sehingga dari tingkat pendapat semakin meningkat. Dengan demikian ekonomi sebagai kita ketahui yaitu kegiatan

beberapa manusia dengan sejumlah masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi beberapa kebutuhan. *Ketiga*, dampak sosial budaya, dampak tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan pariwisata karena adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan. Interaksi tersebut akan menghadirkan pertukaran budaya dari masyarakat lokal dan wisatawan. Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Disamping berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua diskusi/seminar tentang kepariwisataan juga banyak mengemukakan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif). Menilai dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal membutuhkan pengkajian secara mendalam ditengah-tengah masyarakat setempat dan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan. Aspek-aspek tersebut berpengaruh ditengah-tengah masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain atau dampak terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama, bahkan bisa bertolak belakang dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. *Keempat*, dampak politik. Dari dampak politik terhadap pengembangan pariwisata bisa kita lihat bahwa masyarakat yang dulunya belum siap membangun karena kurangnya akses informasi, Pengaruh pengembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa Politik dalam suatu negara (*State*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*Power*) Pengambilan Keputusan (*Desicion Making*),

Kebijakan Publik (*Public Policy*) dan alokasi atau Distribusi (*Allocation or Distribution*). Pengembangan suatu bidang tidak akan terlepas dari proses Politik begitupun dengan bidang Pariwisata. Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri untuk mencari kepuasan dari apa yang dialaminya setiap hari. Menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok bisa mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat dengan usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi pada anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Andrew Heywood politik merupakan kegiatan yang suatu bangsa yang mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Dalam UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Pariwisata adalah kegiatan seseorang dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan perbedaan waktu kunjungan dan motivasi kunjungan. Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. Dalam kepustakaan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan; Konstruksi pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai; *Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.*

3. Pariwisata

Secara epistemologis pariwisata berasal dari Bahasa sangsekerta, yaitu “pari” berarti ‘banyak, berkali-kali, berputar-putar’, dan “wisata” berarti “perjalanan” atau “bepergian”. Berdasarkan arti kata ini, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ketempat lain dengan tujuan tertentu. Menurut UU Republik Indonesia No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya Tarik wisata yang dikunjungi. Desa wisata merupakan pengelolaan dan pembangunan dari suatu desa yang memiliki potensi dan aset yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah objek wisata yang

menarik. wisata dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi, CMCK, kuliner, dan porter wisata. Sehingga hutam alam dan lingkungan pedesaan yang masih terjaga harus dirawat karena wisata yang unggul memahami faktor penting dari kawasan objek wisata. Melalui wisata aktivitas keseharian masyarakat tidak perlu mengikuti perkembangan aktivitas sosial ekonomi desa tetapi diperkuat. Disisi lain bagi pengunjung menjadi daya tarik sendiri. Artinya kaharian desa wisata tidak mengubah aktivitas masyarakat atau wajah desa, tetapi justru dipertahankan akan ciri khas budaya yang melekat pada masyarakat.

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan wisata disebut Wisatawan (*tourist*). Keseluruhan fenomena wisata yang dilakukan wisatawan, termasuk berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pengusaha, masyarakat dan pemerintah, serta usaha-usaha yang terkait dalam bidang tersebut, didefinisikan dengan istila pariwisata.

Dalam Bahasa Inggris, wisata disebut dengan *tour* yang berarti berdarmawisata atau berjalan-jalan melihat pemandangan. Suwantoro (1997: 3-4) menyatakan pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan, misalnya, untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu sehingga terdorong untuk bepergian dengan motif berbagai kepentingan, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, agama, kesehatan dan kepentingan lain seperti ingin tahu, menamba pengalaman, atau untuk meneliti. Secara historis, seseorang atau sekelompok orang melakukan wisata pada

hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan berbagai aktifitas di suatu Negara atau di berbagai Negara.

Industri pariwisata bukan suatu industri yang berdiri sendiri melainkan terdiri dari berbagai komponen-komponen yang saling terkait. Penyelenggaraan system wisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen kepariwisataan yang berperan dalam penyelenggaraan system industry pariwisata secara garis besar terdiri dari komponen pemerintah, jasa kepariwisataan, dan masyarakat disekitar objek wisata.

Berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian dan berkelanjutan. Lebih lanjut pada pasal 4 dinyatakan tujuan kepariwisataan adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawatkan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara

manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Menyimak perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia diatas dapat dinyatakan bahwa pengembangan kepariwisataan bukan hanya upaya dalam meningkatkan perekonomian, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja, namun juga menekankan pada keterlibatan pemerintah, masyarakat dan suasta dalam rangka keberlanjutan kepariwisataan dan pelestarian sumber daya alam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Wardiyanta (2006:6) Penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan membuat gambaran atas objek penelitian yang terjadi secara teratur, akurat, dan berdasarkan fakta lapangan. Penelitian ini juga, digunakan untuk menguji suatu kebenaran atau temuan mengenai berbagai kejadian yang menarik diteliti dimasyarakat. Selain itu, Usman (2009: 4) memberikan penjelasan mengenai penelitian deskriptif mempunyai tujuan yang sistematis sesuai dengan fakta dan karakter kelompok tertentu yang diteliti. Lebih lanjut lagi Usman (2009: 130) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif harus dinarasikan atas jawaban responden, fakta

lapangan, dukumen pendukung yang disusun dan dianalisis dengan kalimat yang mendasar sehingga dapat disimpulkan dan diverifikasi.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan merancang arah penelitian agar terarah dengan baik, maka peneliti akan menentukan jangkuan yang akan diteliti agar dapat terarah sesuai dengan kebutuhan judul penelitian. Sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data dan dapat menarik kesimpulan berdasarkan sudut pandang peneltian. Adapun fokus penelitian yang penelitiaan sebagai seberikut:

1. Menciptakan Suasana Kondusif
2. Penguatan Kapisitas dan Kapabilitas
3. Bimbingan Dukungan

3. Subyek Penelitian

Subjek Penelitian adalah informan dalam penelitian yanag menjadi sumber informasi atas kejadian atau fonemana dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif adapun penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive yang mana dalam penentuan informan tidak tentukan langsung oleh peneliti. Sehingga data yang dicari berdasarkan kebutuhan analisis pada fokus penelitian harus disesuaikan. Sehingga data yang dicari jika anggap sudah terpenuhi, maka proses pengumpulan data selesai (Moleong, 2013:224-225)

4. Obyek Penelitian

Dalam penelitian, penulis akan membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Pariwisata Pinus Pengger Di Dusun Sendang Sari, Kalurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian seorang peneliti harus mempunyai cukup kemampuan dalam proses pengambilan data, memilih informan, data yang relevan, dan alat yang digunakan dengan tujuan mencari informasi yang faktual dan akurat. Dibutuhkan kecermatan dalam menentukan teknik pengumpulan yang dimana akan berpeluang berdampak pada hasil yang teliti. Sehingga peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai, adapun teknik yang akan digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan sejalan yang disampaikan oleh Bugin (2007:110) bahwa tiga teknik diatas dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang independen

a. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data untuk memahami kondisi lapangan dengan panca indra. (Bugin, 2007) menurutnya observasi dengan cara mengamati fenomena lapangan, peristiwa, dan kejadian yang dapat mendukung jalannya penelitian. Observasi juga membantu peneliti untuk

memahami arah penulisan dalam penelitian sehingga dapat menemukan problem yang akan diteliti, kemudian dapat dikomparasikan dengan informasi dan data kaku yang dapat diolah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik memperoleh informasi melalui informan penelitian dengan tujuan mencari dan mendalami kejadian lapangan yang menarik diteliti oleh peneliti. Selain itu, wawancara menjadi salah satu teknik yang aktual melalui komunikasi dua arah di lapangan penelitian. Kemudian wawancara juga menjadi media pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan saling diskusi sehingga dapat diatur dan dinarasikan sesuai dengan topik penelitian Esateberg (2002). Dalam teknik tersebut, sifatnya wawancara mendalam artinya mencari akar permasalahan secara fundamental dan terang menderang (Satori dan Komariah, 2010: 130). Dalam proses wawancara peneliti bertemu beberapa yang mengambil bagian dalam pengelolaan serta masyarakat dan pemerintah setempat untuk memastikan wisata Pinus pengger memberdayakan masyarakat secara sosial ekonomi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dengan memperhatikan data-data yang sifatnya afirmatif terikat, dan tentu sesuai dengan kebutuhan data analisis. Dalam teknik

pengumpulan data ini, peneliti dapat mencari data melalui dokumentasi lapangan, data bersifat administrasi, monografi pemerintahan, profil lembaga, terkait dan peraturan-peraturan yang berlandas. Sehingga mampu mendukung peneliti dalam penyusunan data penelitian sebagai data supporting atas argumentasi analis yang dibagun oleh peneliti. Menurut (Satori dan Komariah, 2010: 149) teknik dokumentasi dapat membantu peneliti dalam menyusun konsep, ide, dan gagasan sebagai bahan pertimbangan yang akurat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah dalam penelitian untuk melakukan penyusuan dan analisis terhadap informasi, data objek pengamatan dilapangan untuk dijadikan sebuah data penelitian yang sistematis dan terpercaya. Penelitian kualitatif sebelum melakukan analisis adapun langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti antara lain: pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan selesai turun lapanagan maka langkah terakhir adalah melakukan analisis data berdasarkan fokus penelitian.

Kemudian setelah peneliti menentukan fokus penelitian maka langsung melakukan kajian lapangan. Teknik Analisis sebagai langkah untuk memahami data analisis dan mencapai hasil penelitian yang baik, maka peneliti dapat mengambil lagkah analisis data kualitatif versi Milles dan Huberman (Usman dkk, 2009:85). Yaitu menggunakan tiga alur

teknik analisis yang berjalan secara bersamaan yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penelitian dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih dan menyaring kembali data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan memperoleh data penelitian yang sesuai dengan problem yang akan diteliti. Hasil reduksi tersebut akan memberikan sedikit gambaran dan dapat membantu peneliti menemukan titik terhadap topik yang diteliti.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian penyajian data atau *display data* adalah langkah yang selanjutnya akan diperoleh peneliti setelah\ melakukan reduksi data. Kemudian peneliti dalam hal ini dapat menarik kesimpulan terhadap beberapa topik yang disajikan dalam bentuk naratif, grafik, tabel, bagan, dan matriks. Artinya peneliti mudah memahami arah penelitian berdasarkan data lapangan yang disajikan.

c. Verifikasi Data

Dalam teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti pada tahap akhirnya adalah verifikasi data yang dimana peneliti dapat memastikan data analisis yang diperoleh dari lapangan. Artinya penarikan kesimpulan yang dilakukan akan bersifat sementara, jika bukti-bukti lapangan terhadap analisis yang dilakukan tidak

ditemukan atau tidak berdasarkan fakta lapangan. Pada tahap ini juga peneliti wajib melukan validasi data sehingga dapat menyimpulkan data yang sifatnya masih ragu-ragu diteliti menjadi jelas.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa Terong

Pada awalnya alas terong merupakan wilayah yang berada di perbukitan dan jau dari pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram. Saat terjadi Geger Suroyodo di kerajaan mataram kemudian seorang perajurit Ki Putrojiwo menyingkir ke bagian wilaya timur serta mambawa istri dan anak. Setelah Ki Putrojiwo meninggal istri dan anaknya Nyi Juputro bersama Tronoggo menyingkir lebih ketimur dari wilayah Kerajaan Mataram, mereka kemudian menaiki gunung yang sekarang di sebut Conomati dan sampailah di sebuah wilayah yang kemudian Nyi Jupotro memberikan nama wilayah tersebut Alas terong karena banyak di tumbuhi tanaman liar terong hutan.

Alas terong yang terletak di perbukitan tersebut kemudian oleh Nyi Jupotro di jadikan sebagai tempat tinggal yang jau dari Kekuasaan Kerajaan Mataram. Seiring berjalannya waktu, kemudian beberapa orang datang ke alas terong baik dari utara juga dari barat, menetaplah mereka di alas terong sehingga terjadilah interaksi sosial masyarakat alsa terong. Seiring berjalannya waktu, pada awalnya Kelurahan Terong merupakan wilaya dari Kecamatan Kota Gede. Namun, pada tahun 1974 ketika berdirinya Kecamatan Dlinggo maka Kelurahan Terong kemudian menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Dlinggo, Kabupaten Bantul DIY.

B. Keadaan Geografis Desa Terong

Kalurahan Terong merupakan sebuah Desa/Kalurahan yang berada di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibentuk pada tahun 1912. Secara administrasi Kalurahan Terong memiliki nomor kode wilayah 340211205 dan kode pos 55783. Letak geografis wilayah Kalurahan Terong terletak dikawasan perbukitan dengan ketinggian 325-350 meter dari atas permukaan dan luas wilayah 775, 8615 Ha. Jarak Kalurahan Terong dari ibu kota Kecamatan sejauh 7 km, Kabupaten Bantul ditempuh dengan jarak 25 km dengan, sedangkan Ibu Kota Kabupaten sejauh 23 km dan jarak dan kota provinsi berjara 25 km dari Kalurahan. Kalurahan Terong memiliki batas-batas wilayah bagian timur berbatasan dengan Desa Jatimulyo, wilayah bagian barat berbatasan dengan Desa Wonolelo, Kapanewon Pleret, bagian utara berbatasan dengan Desa Srimulyo, Kapanewon Piyungan dan wilayah bagian selatan berbatasan dengan Desa Muntuk, Kapanewon Dlingo.

1. Gambaran Wilayah

Tabel 2. 1
Pembagian Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No	Keterangan	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	37.00
2	Luas Persawahan	144.80
3	Luas Perkebunan	86.40
4	Luas Kuburan	0.40
5	Luas Pekarangan	106.00
6	Luas Perkantoran	0.79
7	Luas Sarana Prasarana Umum	23.63
8	Tegalan	521.65
TOTAL		775.8615

Sumber: <http://Terong-bantul.Desa.id/first> 2022

Luas penggunaan lahan di Kalurahan Terong dapat dilihat pada tabel diatas yang mana lahan persawahan, lahan pekarangan, dan perkebunan, serta penggunaan lahan pada pembangunan sarana-prasarana umum, pemukiman, dan pemukiman. Dari penggunaan tersebut, penggunaan lahan banyak digunakan pada bidang pertanian atau perkebunan. Hal tersebut, sejalan dengan data kependudukan Kalurahan Terong bahwa hampir sebagian masyarakat menggeluti bidang pertanian atau sebagai petani dan buruh harian.

C. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Kependudukan merupakan data kewarganegaraan disetiap wilayah tertentu yang telah memasuki usia produktif dibuktikan dengan kartu identitas. Data kependudukan menjadi hal yang dasar dalam sistem bernegara sebagai bahan pertimbangan melaksanakan berbagai bentuk sistem pemerintahan termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. tidak hanya itu, data tersebut juga digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat berdasarkan jenis tertentu. Sehingga dapat mempermudah pemerintah mengtahui masyarakat tertentu melalui data kependudukan yang telah didata oleh pemerintahan Kalurahan Terong. Selanjutnya untuk mengtahui dan memahami terkait kependudukan di Kalurahan Terong, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		laki-laki	perempuan	
1	>1	145	48	193
2	2-4	113	131	244
3	4-9	193	174	367
4	10-14	205	193	398
5	15-19	227	188	415
6	20-24	200	199	399
7	25-30	197	198	395
8	30-34	162	195	357
9	35-39	214	183	397
10	40-44	195	215	410
11	45-49	216	216	432
12	50-54	184	185	369
13	55-59	174	204	378
14	60-64	148	160	308
15	65-69	95	125	220
16	70-74	96	131	227
17	75+	117	147	264
Total		2.881	2.892	5.773

Sumber: Monografi Desa Terong tahun 2022

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kalurahan Terong diatas dapat dipahami bahwa jumlah perempuan dan laki-laki hampi *balance* atau tidak ada yang mendominasi sebagai super rior secara kuantitatitas. Artinya peningkatan angka kelahiran setiap tahun pada puluhan tahun yang lalu berjalan tidak pada konteks jumlah kelahiran berdasarkan jenis kelamin tidak terjadi dominasi. Sehingga jika dikaitkan dengan adanya penindasan pada kaum perempuan pada wilayah kerja atau sejenis, maka kecil kemungkinan terjadi di wilayah ini.

Peneliti akan mencoba melihat jumlah penduduk tersebut, berdasarkan usia. Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah

penduduk di Kalurahan Terong didominasi oleh usia 45-49 dengan jumlah 432 orang, usia remaja 15-19 berjumlah 415 orang, usi 40-44 berjumlah 410 orang, usia 20-24 jumlah 399 orang, serta pada usia 10-14 398 orang. Bagi peneliti melihat data tersebut tidak ada jumlah perbandingan yang sangat signifikan antara generasi di Kalurahan Terong. Walaupun jika dilihat dari usia 40-60 dan 15-39 jumlah penduduk tersebut berbeda tipis dengan presentase 2-3 % antara generasi.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan didalam sosial masyarakat memiliki pengaruh yang sangat positif sebagai alat mengubah pola pikir, meningkatkan taraf hidup, serta memiliki pengaruh yang sangat mendasar dari pandangan status sosial seseorang. Pendidikan juga, berperan pada karakter, sifat, dan kreativitas dalam prospek kehidupan. Kemudia karena pengaruh pendidikan pada wilayah tertentu disebuah negara juga menjadi tolak ukur melihat kualitas sumber daya manusia. Sehingga sudah tentu pengelompokkan jumlah penduduk akan ditentukan berdasarkan riwayat pendidikan untuk memahami masyarakat secara simplifikan. Dengan demikian, pembangunan di suatu wilayah dapat tentukan oleh pendidikan misalnya jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kalurahan Terong dapat dilihat dan dipahami melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2. 3 Data
Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	894	980	1874
2	SLTP/Sederajat	674	670	1344
3	SLTA/Sederajat	724	552	1276
4	Tidak/Belum Sekolah	445	568	1013
5	Belum Tamat SD/Sederajat	240	192	432
6	Diploma IV/Strata I	52	53	105
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	18	21	39
8	Diploma I/II	9	17	26
9	Strata II	5	2	7
10	Strata III	1	0	1
TOTAL				6117

Sumber: <http://Terong-bantul.Desa.id/>first 2022

Data jumlah penduduk di Kalurahan Terong dapat dihati bagaimana kondisi sosial masyarakat yang menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Rendahnya pendidikan masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi sangat tidak seimbang dengan angka jumlah penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Menengah kebawah. Artinya kesenjangan pendidikan terjadi di Kalurahan Terong, ini harus menjadi cacatan dan tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui program-program pemberdayaan. 148 orang atau setara dengan 1,4 % masyarakat dengan pendidikan tinggi di Kalurahan Terong merupakan angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan daerah poit penting yang dimana daerah yang maju

bukan dilihat dari sejauh mana pembangunan infrastrukturnya, program yang dijalankan, serta pendapatan ekonominya tetapi dilihat dari SDM.

c. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian merupakan data pendudukan dengan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sehari hari. Pekerjaan yaitu aktivitas sosial ekonomi masyarakat kalurahan untuk menjalankan kehidupan dan penghidupan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di Kalurahan Terong mata pencarian masyarakat cuku beragam sesuai pada bidang yang ditekuni dari berbagai sektor ekonomi. Untuk mengetahui lebih lanjut jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Sektor Pertanian	5.124
2	Sektor Peternakan	12
3	Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	34
4	Sektor Perdagangan	12
5	Sektor Jasa	139
TOTAL		5.321

Sumber : Monografi Desa Terong 2022

Pada tabel diatas peneliti akan memberikan sedikit gambaran berkaitan dengan aktivitas pekerjaan masyarakat di Kalurahan Terong. Tidak berbeda jauh dengan angka jumlah pendidikan yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas artinya tingkat pendidikan dapat menentukan nasib kehidupan seseorang dalam pekerjaan sehari-hari.

Jumlah petani 5.124 merupakan angka yang sangat besar untuk sebuah Kalurahan. Artinya ketimpangan sosial ekonomi pasti terjadi, apa lagi jika dikaitkan dengan status sosial masyarakat. Dalam hal ini, peneliti tidak memandang petani adalah pekerjaan yang salah tetapi pemerintah harus memperhatikan sektor pertanian sebagai program utama untuk menata hasil pertanian untuk perkembangan ekonomi masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial yang berlebihan. Disisi lain dengan adanya wisata hutan Pinus Pengger harapannya dapat membuka peluang baru dan aktivitas sosial ekonomi yang memadai tetapi justru dalam pengelolaannya hanya terdapat Padukuhan Sendang Sari yang terlibat didalamnya dengan alasan bahwa hanya padukuhan itulah yang terlibat didalamnya selama pembangunan ekowisata tersebut dapat berjalan. Namun pengelolah hutan kurang mehami hutan sebagai sumber daya bersama yang harus dikelola dengan tujuan yang sama.

D. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Kondisi sosial Kalurahan Terong masih suguhkan dengan masyarakat gotong royong yang masih mempertahankan nilai-nilai sosial budaya mengikuti budaya masyarakat jawa. Dalam setiap proses sosial yang ditemukan peneliti melalui diskusi bersama informan dan program kebudayaan misalnya bersih desa, jahtilan, ketoprak, dan kesenian-kesenian budaya lainnya merupakan unsur budaya yang masih terawat di Kalurahan Terong. Sehingga relasi

sosial masyarakat antara warga masih terawat melalui berbagai kebudayaan. Didalam pembangunan juga pun Kalurahan Terong masih penerapan musyawarah dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai pada Musyawarah Kaluraan (MUSKAL).

Selain itu, Kalurahan Terong secara potensi memiliki beberapa aset dan sumber daya alam yang cukup melimpah misalnya disektor pertanian misalnya Kalurahan Terong memilik potensi wilayah sawah lahan basah yang cukup luas, ekowisata pemanfaatan hutan yaitu Pinus Pengger dan Gunung Mungker, dan pasar desa dibawah pengawasan BUM Desa. Namun yang paling diungguli oleh di Kalurahan Terong adalah hasil alam seperti padi, jagung, ketela, dan tanaman palawija hail masyarakat kemudian didagangkan untuk menunjang kebutuahn hidup.

Pada bidang sosial lembaga Kalurahan Terong bisa dikatakan cukup lengkap membangun lembaga-lembaga sosial dan ekonomi masyarakat yang membantu menjalankan roda pemerintahan misalnya pada bidang pendidikan terdapat TK dan Sekolah Dasar, kesehatan ada puskemas, kemudian lembaga penangulangan kemiskinan seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Cummunity Mengentaskan Kemiskinan (CDMK), Pada organisasi pemuda terdapat Karang Taruna MEKAR, kelompok Ibu-Ibu diwadahi oleh PKK, Serta yang bergerak pada bidang sosial ekonomi terdapat BUM Desa. Dari lembaga-lembaga tersebut, tentu memiliki tujuan pembentukan seperti pelatihan, pemberdayaan, transfer pengetahuan, peningkatan mutu

pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan ekonomi masyarakat.

2. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Terong

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kalurahan dapat dilihat dari berbagai metode seperti pendidikan, pendapatan ekonomi, sanitasi, dan gaya hidup sehari-hari. jika beberapa faktor diatas terpenuhi dengan baik maka bisa dikatakan sejahtera begitupun sebaliknya. Tingkat kesejahteraan berdasarkan birokrat pemerintahan memiliki beberapa kategori sesuai dengan taraf hidup atau kebutuhan dasar. Berdasarkan pengetahuan peneliti khususnya di wilayah DIY masyarakat pra sejahtera diperhatikan khusus melalui program-program pemerintah sesuai dengan DTKS. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan di Kalurahan Terong sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Terong

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Keluarga Pra Sejahtera	305 Keluarga
2	Keluarga Sejahtera 1	501 Keluarga
3	Keluarga Sejahtera 2	810 Keluarga
4	Keluarga Sejahtera 3	200 Keluarga
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	40 Keluarga
TOTAL		1.856 Keluarga

Sumber: Data Profil Desa Terong 2022

Berdasarkan tabel kesejahteraan diatas menunjukkan adanya tingkatan kesejahteraan di Kalurahan Terong yang mana keluarga pra sejahtera terdapat 305 Keluarga yang dinilai belum

cukup memenuhi kebutuhan dasar seperti makanaa bergisi dan sanitasi, maupun pendapatan rendah. Begitupun juga pada keluarga sejahtera 1 di Kalurahan Terong dengan jumlah 501 keluarga yang digategorikan sudah memenuhi kebutuhan dasar tetapi tidak memenuhi beberapa indikator pada kebutuhan psikologis sehingga disebut sejahtera 1. Sedangkan pada keluarga sejahtera 2 merupakan kategori kesejahteraan di Kalurahan Terong yang berjumlah 810 keluraga merupakan yang sudah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologi, tetapi tidak pada memenuhi beberapa indikator pada kelas 3 yaitu berkaitan dengan kebutuhan pengembangan. Sama juga pada keluarga sejahtera tiga dengan jumlah 200 keluarga yang mana sudah memenuhi pada penilaian indikator kesejahteraan pada kelas 1,2, dan 3, tetapi tidak memenuhi beberapa kriteria pada keluarga sejahtera 3 plus. Sebaliknya pada keluarga 3 plus dengan 40 keluarga yang sudah bisa dikatakan sudah sejahtera dari segi kebutuhana sehari-hari, pendidikan, pendapatan menengah keatas, terpenuhi secara materiil dan memiliki waktu yang cukup, serta aktif diberbagai kegiatan sosial masyarakat.

3. Tingkat Kemiskinan Masyarakat Desa Terong Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

Kemiskinan di Kalurahan Terong peneliti akan melihatnya secara kompeks berkaitan dengan standarisasi akan kehidupan seperti pendapatan keluarga, akses pendidikan, kebutuhan dasar

sandang dan papan, serta kemampuan mendapatkan akses kesehatan yang baik. Hal ini, bisa disebabkan oleh kondisi keluarga yang sulit mengakses pekerjaan yang lebih layak karena dilihat dari tingkat pendidikannya. Sehingga dari hal ini, peneliti berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya menrubah pola pikir seseorang tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui bidang yang ditekuni. Untuk mengetahui data kemiskinan Kalurahan Terong dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Data Tingkat Kemiskinan KK DesaTerong

No	Nama Padukuhan	Jumlah (KK)	Percentase(%)
1	Padukuhan Pancuran	76 KK	17%
2	Padukuhan Sandang Sari	68 KK	15%
3	Padukuhan Terong I	30 KK	7%
4	Padukan Rejosari	25 KK	5%
5	Padukuhan Saradan	51 KK	11%
6	Padukuan Pencit Rejo	74 KK	16%
7	Padukuhan Kebokuning	37 KK	8%
8	Padukuhan Terong II	61 KK	13%
9	Padukuhan Ngenep	37 KK	8%
TOTAL		459 KK	100

Sumber: <http://Terong-bantul.Desa.id/first> 2022

Data kemiskinan di Kalurahan Terong berdasarkan Kepala Keluarga yang tersebar di sembilan Padukuhan memiliki presenrasi kemiskinan yang berberda-beda jika akumulasikan perbedaan antara padukuhan berada pada 5-10%. Artinya tingkat kemiskinan tersebut akan terlihat sesuai dengan aktivitas sosial ekonomi disetiap padukuhan. Dari

tabel diatas menunjukkan presentaase kemiskinan terdapat di Padukuhan Sendang Sari, Pancuran, dan Pencit Rejo. Sedangkan pada padukuhan dengan prsentase terrendah di Padukuhan Terong 1, Kebokuning, dan Ngenep.

Yang menjadi perhatian peneliti adalah di Padukuhan Sendang Sari yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa ekowisata Pins Pengger terletak disana. Seharusnya dengan adanya aktivitas ekonomi wisatawan dapat membantu masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Tetapi malah sebaliknya padukuhan tersebut mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi dari Padukuhan lainnya di Kalurahan Terong. Artinya berdasarkan pengamatan peneliti melihat bahwa pengelolaan ekowisata tersebut tidak terserap di Kalurahan Terong tetapi oleh koperasi yang bekerja sama dengan pengelolaan hutan. Dampaknya tidak hanya memberikan dampak aktivitas wisata yang memadai tetapi Kalurahan Terong hanya menjadi penonton atas pengelolaan tersebut.

E. Profik Kelompok Sadar Wisata Pinus Pengger (POKDARWIS)

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan salah Kelurahan Desa Terong adalah salah satu Lembaga yang dibentuk pada tahun 2016 yang diberikan tugas dalam penyelenggaraan pariwisata, atau yang mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di desa. Seperti pengelolaan dan pengembangan, promosi serta pengembangan fasilitas wisata. Tujuan dari pada pembentukan Lembaga tersebut adalah untuk membantu mendorong dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta membuka peluang tenaga kerja desa sekaligus membantu dan mendorong pendapatan ekonomi asli desa (PADes) Kelurahan Desa Terong.

Kelompok Sadar Wisata di bentuk pada tahun 2016 berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat Desa terong Dusun Sandang sari yang kemudian ditetapkan Berdasarkan Peraturan Desa (PER Desa) No 7 Tahun 2018 yang ditetapkan Pada Tanggal 18 Maret 2016 Tentang PENGUKUHAN KELOMPOK TANI PINUS SARI BLOK TERONG yang selanjutnya di sebut sebagai Kelompok Sadar Wisata.

Tabel 2. 7
Sususn Pengurus Kelompok Sadar Wisata

No	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung	1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunana DIY 2. Kepala Balai KPH DIY	
2.	Pembina	1. Kepala RPH Mangunan 2. Lurah Desa Terong 3. Dukuh Sandang Sari 4. Giriyatno	- Tokoh Masyarakat
3.	Ketua 1	Sumar	
	Ketua II	Juwinto	
4.	Sekretaris 1	Galva Andrianto	
	Sekretaris II	Joko Sulistyo	
5.	Bendahara 1	Sugiri	
	Bendahara II	Beni Nurhidayat	
6.	Seksi Keamanan	1. Kasi. Pemerintahan Desa Terong 2. Lanjar Nurhadi 3. Wagiman 4. Gimanto	

		5. Giran 6. Hariyanto	
7.	Seksi Humas	1. Ngadiyo 2. Rudi Rusmanto 3. Wagino 4. Jumiran 5. Indra Jumari	
8.	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	1. Rendi Eko Prasetyo 2. Johan Novianto 3. Widodo 4. Nur Soni 5. Sugiran 6. Triono	
9.	Seksi Pembangunan	1. Sujianto 2. Gatot 3. Tardi 4. Bekti 5. Sukiman	
10.	Seksi Kebersihan	1. Warto 2. Ngadiman 3. Sudiyanto 4. Sutarman 5. Pangidi	
11.	Seksi Seni dan Budaya	1. Giarto 2. Gimin 3. Suntoro	
12.	Anggota	1. Ngatemo 2. Saridi 3. Lilik 4. Gunawasm 5. Sarianto	

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Aan 7. Danang 8. Suranto 9. Wagiran 10. Mursidi 11. Ferry Landung 	
--	--	---	--

Sumber Data: surat keputusan desa terong

F. PROFIL WISATA PINUS PENGGER

1. Latar Belakang

Terbentuknya wisata pinus pengger di desa terong, pada awalnya adalah hasil dari pemikiran anak-anak muda dusun sandangsari pada bulan Januari tahun 2016 yang terinspirasi dari wisata mangunan. Yang kemudian mengerakan para pemuda dusun sandangsari untuk membuka wisata di kawasan hutan lindung, namun dalam perjalannya terkendala dengan proses perizinan pengelolaan hutan lindung. Namun seiring berjalannya waktu dengan melalui proses perizinan yang kemudian di setujui oleh Koperasi Notowono sebagai lembaga yang memiliki kewenagan pengelolan wisata di mangunan salah satunya adalah pengger. Setelah dari situ proses pemberihan-pun kemudian di lakukan pembangunan dan sebagainya untuk fasilitas wisata. sehingga pada tanggal 7 April 2016 secara resmi di kukuhkan sebagai wisata yang kemudian pada tanggal 12 februari wisata pinus pengger resmi menggunakan Tiker retribusi wisata.

wisata pinus pengger merupakan salah satu wisata yang masuk dalam wilaya kelola KPH Provinsi Yogyakarta dengan luas kelola

15.581 ha mencakup (Hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan lindung). Wisata pinus pengger terletak di Dusun Sandangsari, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan jarak tempuh dari kota yogyakarta 25 km dalam waktu tempuh 40 menit.

wisata pinus pengger adalah wilaya kelola RPH Mangunan yang terdiri dari 3 blok yakni Blok Kediwung, Blok Terong, dan Blok Mangunan dengan memiliki 7 objek wisata yang secara resmi telah di kerja samakan dengan Pemerintah DIY sejak 7 februari 2017 yang terdiri dari Gunung Pengger, Puncak Bacici, Lintang Sewu dengan (dua sub Unit Pinus Asri dan Lembag Dahromo), Hutan Pinus Sari, Seribu Batu, Bukit Pangguk, dan Bukit Mojo.

berdasarkan Pergub No 84 tahun 2016 dengan model pengembangan ekowisata dan Pergub DIY No 86 tahun 2016 tentang Jasa layanan wisata yang selanjutnya di perbaharui menjadi Peraturan Gubernur DIY No 5 tahun 2018 tentang kerja sama dan perizinan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung serta kerja sama pemanfaatan taman hutan raya. Kemudian dalam pengelolaannya wisata alam mangunan di kerja samakan dengan lembaga masyarakat/Koperasi Notowono dengan No 119/01600/04/2019 tentang Perjanjian Kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Koperasi Notowono tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung di RPH Mangunan, BDH Kulonprogo-Bantul Balai KPH Yogyakarta. pada perjanjian kerja sama tersebut

kemudian di sebutkan nilai bagi hasil sebesar 75% untuk Koperasi dan 25% untuk Pemerintah DIY.

Wisata Pinus Prngger secara resmi di buka pada tanggal 7 april 2016 Dalam pengelolaannya wisata pinus pengger Koperasi notowono mengkerja samakan dengan Kelompok Sadar Wisata dusun sandang sari sebagai Operator Koperasi. Kelompok Sadar Wisata ini di Ketuai oleh (Sumar) dengan Jumlah Anggota 41 orang sebagai anggota Inti. Secara organisasi anggotanya di dominasi oleh pemuda Dusun Sandang Sari, kegiatan kelompok Sadar Wisata ini bermacam-macam antara lain menjaga kebarsihan, memandu pembelajaran Out Dor tentang alam. Tim petugas parkir, loket, pemndu, keamanan dan humas.

Dengan demikian wisata pinus pengger di kelola oleh Kelompok Sadar Wisata Dusun Sandangsari sebagai operatornya koperasi notowono. Dalam pengembangan dan pengelolaan wisata pinus pengger dari tahun 2016-2023 berbagi fasilitas wisata telah di lengkapi seperti; spot foto kemudia area camping, ayunan, gasebo dan di lengkapi dengan sarana-prasarana wisata lainnya yaitu mushola, toilet wanita dan laki-laki serta area warung makan/minum. kemudian parkir kendaraan motor dan mobil. Sedangkan untuk memasuki wisata pinus pengger di kenakan biaya parkir permotor Rp 3.000 untuk tiket masuk Rp 5.000 perorang. Sedangkan untuk parkir mobil Rp 5.000, ELF Rp 5.000 Bus Sedang Rp 15.000 dan bus besar Rp 20.000.

2. Data Pengunjung dan Pendapatan Wisata Pinus Pengger

Data pengunjung dan data pendapatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur penilaian terhadap suatu objek wisata yang dikembangkan dan dalam proses berjalannya apakah mengalami kemajuan atau tidak. Disisi lain, data pengunjung dan data pendapatan agar dapat mengambarkan data sekaligus menjelaskan data baik data pengunjung dan data pendapatan wisata. Berkaitan dengan ini, seperti halnya dengan wisata pinus pengger semenjak diresmikan pada tahun 2016 sampai dengan 2022 dapat dilihat dan dijelaskan tingkat pengunjung pertahun dan pendapatan pertahun seperti tabel dibawa ini:

Tabel 2. 8
Data Pengunjung dan pendapatan

No	Tahun	Pengunjung	%	Pendapatan	%
1	2017	33.9101	17	Rp 759.304.700	15
2	2018	57.8853	29	Rp 1.348.728.500	27
3	2019	74.2900	38	Rp 2. 028.381.600	41
4	2020	31.7128	16	Rp 808.752.250	16
Total		1.977.982	100	Rp 4.945.167.050	100

Sumber Data: Laporan Tahunan Wisata Pinus Pengger 2022

Dari tabel 2.8 di atas dapat di lihat bahwa data pengunjung dan pendapatan Wisata Pinus Pengger dalam empat tahun terakhir dari tahun 2017-2022 dapat di lihat. Pada laporan tahun 2017 pertama jumlah pengunjung mencapai 17% dengan total pendapatan 15%. Namun dalam perjalanannya bahwa jumlah

pengunjung dan pendaapanan wisata pinus pengger meningkat secara drastis pada tahun 2019 dengan total pengunjung 38% dan total pendapatan 41%, kemudian di ikuti dengan peningkatan dan pendapatan pada tahun 2018 dengan total pengunjung 29% dan total pendapatan 27% dalam setiap satu tahun. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengunjung dan pendapatan wisata pinus pengger menurun secara drastis dengan total pengunjung 16% dan pendapatan hanya mencapai 16% dalam satu tahun.

Dengan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa peningkatan Jumlah pengunjung dan pendapatan wisata Pinus Pengger secara fantastis pada tahun 2019 dan 2018 dengan jumlah pengunjung dalam dua tahun mencapai 1.321.753 pengunjung atau 67% dengan pendapatan Rp 3.377.110.100/68% dalam dua tahun. Sedangkan pada tahun 2020 wisata pinus pengger mengalami penurunan pengunjung hanya mencapai 16% yang kemudian berdampak pada pendapatan wisata pada tahun 2020 mencapai 16%.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Deskriptif Informan

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam wisata Pinus Pengger. Dari beberapa data informan penelitian pada tabel dibawah ini merupakan masyarakat Padukuhan Sendangsari di Kalurahan Terong yang terlibat sejak pembangunan wisata Pinus Pengger dari tahun 2016 hingga saat ini. Informan penelitian dalam hal ini juga melibatkan Pemerintah setempat yang memiliki kewenangan atas wilayah administrasi kalurahan yang terdapat hutan lindung sebagai aktivitas pariwisata. Informasi yang diperoleh dari informan berupa data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara terkait permasalahan yang ingin diteliti. Data primer tersebut kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1	Vina Aryani, S.pd	38	Sekretaris Kelurahan
2	Suyadi	52	Dukuh Padukuhan Sendangsari
3	Sumar	40	Pengelola Hutan Pinus Pengger
4	Parmo	68	Pengelola Hutan Pinus Pengger
5	Miswanto	42	Ketua RT 03

Sumber: monografi Kalurahan Terong 2023

B. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata

Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang berperan aktif bukan hanya dalam pengelolaan destinasi pariwisata, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang

mendukung keberlanjutan dan keberhasilan sektor pariwisata secara keseluruhan. Pada bagian ini, diulas beberapa pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan desa wisata berdasarkan konsep yang telah dikemukakan di dalam kerangka konseptual untuk dapat dianalisis sesuai dengan data lapangan yang telah ditemukan.

1. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat (*Empowering*) yang merupakan langkah awal yang esensial dalam pemberdayaan. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata, khususnya di Dusun Sendang, Kalurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Prinsip ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang mengacu pada memberikan kemampuan individu atau kelompok untuk mengambil tindakan yang lebih efisien dan efektif. Dalam kerangka konseptual, penguatan ini mewakili upaya dalam meningkatkan "kemampuan melakukan sesuatu" (*ability to do*) serta memberi "kemampuan atau keberdayaan" (*enablement*). Dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas, masyarakat desa wisata dapat mengambil peran yang lebih proaktif dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata desa.
2. Menciptakan suasana kondusif di masyarakat (*Enabling*) yang merupakan strategi untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat, yang diharapkan dapat memungkinkan individu atau kelompok dalam berpartisipasi aktif untuk pengembangan pariwisata, sehubungan kerangka

konseptual, langkah ini berhubungan dengan "menciptakan suasana kondusif" yang melibatkan motivator dan fasilitator untuk mendukung masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pariwisata Pinus Pengger di Kelurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti membuka pintu kesempatan, memberikan informasi yang diperlukan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

3. Bimbingan dan Dukungan (*Supporting*) yang merupakan pemberdayaan dalam hal melibatkan bimbingan dan dukungan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam pengembangan pariwisata, dalam konteks ini, dukungan mencakup pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang relevan. Seperti yang diulas di dalam kerangka konseptual, aspek ini dapat dilihat sebagai "bimbingan dan dukungan" yang melibatkan membimbing masyarakat dalam mengatasi hambatan serta memberikan mereka sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dan efektif dalam pembangunan pariwisata.

Memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang (*Forestsing*). Pentingnya memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang juga merupakan bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Ini mencakup menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan dan kelestarian budaya. Dalam kerangka konseptual, aspek ini dapat dikaitkan dengan

"memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang," yang menggambarkan pentingnya menjaga lingkungan sosial, budaya, dan alam agar tetap seimbang dalam proses pengembangan pariwisata. Bagian ini, dideskripsikan lebih lanjut bagaimana setiap pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan dalam konteks pengembangan desa wisata. Melalui integrasi konsep pemberdayaan dengan pengembangan desa wisata, dapat dilihat bagaimana masyarakat lokal dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi semua pihak. Penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (*empowering*).

Penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (*empowering*) memegang peranan sentral dalam pemberdayaan komunitas lokal, khususnya dalam konteks pengembangan destinasi wisata alam seperti Pinus Pengger di Dusun Sendang Sari. Konsep ini merujuk pada upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan, promosi, dan pelestarian potensi wisata di lingkungannya. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas dan kapabilitas memiliki beberapa elemen yang saling terkait. Pemberdayaan di dalam konteks pariwisata melibatkan motivator dan fasilitator yang membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang potensi wisata, serta memberikan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan destinasi. Dalam hal ini, masyarakat Dusun Sendang Sari diharapkan mampu mengasah kemampuan dalam mengelola aspek-aspek pariwisata,

seperti kebersihan, keamanan, keramahan, dan pelayanan kepada wisatawan.

Penerapan konsep *empowering* di Dusun Sendang Sari dapat melibatkan pelatihan bagi masyarakat mengenai pemasaran, pengelolaan keuangan yang kemudian masuk dalam koeprasi Noto Wono, dan kerjasama tim. Data-data terkait tingkat pengetahuan masyarakat tentang potensi wisata Pinus Pengger, serta keterampilan yang mereka miliki dalam mengelola tempat wisata, menjadi landasan dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif dalam mengelola destinasi wisata, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari penerimaan wisata dan memiliki rasa memiliki terhadap keberlanjutan destinasi.

Penerapan penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pemberdayaan wisata Pinus Pengger di Dusun Sendang Sari akan berdampak positif terhadap efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan destinasi tersebut. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola aspek-aspek operasional dan promosi pariwisata. Hal ini juga mendukung visi pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata, sejalan dengan pendekatan pemberdayaan yang diuraikan dalam kerangka teori di atas.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di atas, maka beberapa instansi yang sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul: Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menginisiasi dan membimbing program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. *Kedua*, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bantul: Dinas ini menjadi mitra utama dalam mengkoordinasikan dan memberikan arahan mengenai pengembangan pariwisata. *Ketiga*, Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian: Keterlibatan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dalam proyek ini memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan teknis kepada masyarakat setempat. *Keempat*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komunitas Lokal: LSM atau komunitas lokal yang memiliki pengalaman dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan dukungan teknis dan bimbingan langsung kepada masyarakat Dusun Sendang Sari. Dengan sinergi antara berbagai pihak tersebut, pemberdayaan masyarakat Dusun Sendang Sari dalam pengembangan wisata Pinus Pengger dapat terwujud secara holistik.

Dalam wawancara mendalam dengan Pak Sumar Sebagai bagian dalam pengelolaan, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) pertama-tama kita melakukan penyuluhan dalam hal pengetahuan masyarakat, keterampilan, promosi, pengelolaan, dan menjaga lingkungan. Dalam melakukan itu semua, kita melibatkan LSM dan Perguruan Tinggi seperti UAD dan beberapa kampus yang lain. Maksud dan tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar paham terkait dengan pengelolaan pariwisata, kemudian terampil dalam mendesain tempat wisata, dan juga bisa mempromosikan wisata kita ke dunia luar dengan begitu, kita bisa menerima banyak kunjungan tetapi dengan satu syarat harus tetap menjaga lingkungan sekitar”

Dari jawaban informan di atas, yang disampaikan oleh ketua Pokdarwis Pinus Pengger, terdapat keterkaitan antara konsep pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Informan menjelaskan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Melalui dari kegiatan penyuluhan, masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola destinasi pariwisata dengan baik. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa pemberdayaan melibatkan peningkatan kapabilitas individu dan kelompok untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti konflik dan lain-lain antara masyarakat. Oleh karean itu, dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, informan menjelaskan bahwa ada kemitraan atau kerja sama dengan berbagai entitas eksternal seperti LSM dan Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dengan pemberian pengetahuan tetapi juga melibatkan jaringan kerjasama yang luas untuk mendukung perkembangan komunitas pariwisata. Keterlibatan institusi pendidikan dan LSM dalam proses ini sesuai dengan pandangan bahwa pemberdayaan melibatkan pemberian kemampuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Contoh data pendidikan yang dapat dibandingkan dengan konsep bahwa masyarakat perlu mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait pariwisata dapat diukur dari pendidikan formal sebagai berikut:

Tabel 3.2

Data Pendidikan di Kalurahan Terong

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
----	----------	-----------	-----------	--------

1	Tamat SD/Sederajat	894	980	1874
2	SLTP/Sederajat	674	670	1344
3	SLTA/Sederajat	724	552	1276
4	Tidak/Belum Sekolah	445	568	1013
5	Belum Tamat SD/Sederajat	240	192	432
6	Diploma IV/Strata I	52	53	105
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	18	21	39
8	Diploma I/II	9	17	26
9	Strata II	5	2	7
10	Strata III	1	0	1
TOTAL				6117

Sumber: monografi Kalurahan Terong 2023

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Pinus Pengger mencakup beberapa aspek. *Pertama*, masyarakat dilibatkan dalam mendesain tempat wisata, memastikan bahwa keunikan dan potensi lokal terjaga. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pada pemberian kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan wilayah mereka. Selain itu, masyarakat didorong untuk mempromosikan destinasi pariwisata Pinus Pengger ke luar daerah. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pemberdayaan juga mencakup pemberian wawasan dan kemampuan dalam hal promosi dan pemasaran, namun, informan juga menegaskan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya tentang pengembangan pariwisata semata tetapi terdapat komitmen yang kuat untuk menjaga lingkungan sekitar. Konsep ini menunjukkan bahwa pemberdayaan diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak diabaikan, tetapi juga tidak mengorbankan kelestarian alam.

Secara keseluruhan, jawaban informan mencerminkan implementasi nyata dari kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya. masyarakat menggabungkan konsep pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan perhatian terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan. Melalui kerjasama dengan pihak eksternal dan pemberian pengetahuan serta keterampilan kepada masyarakat dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat lokal dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan pariwisata di desa dengan cara yang berkelanjutan dan berdampak positif.

Dalam wawancara dengan Ibu Vina selaku Carik Kelurahan Terong, Ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 17 Juli 2023) dalam proses pemberdayaan, kami dari Pemerintah Kalurahan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terikait pentingnya pariwisata dengan mengundang berbagai stakeholder, misalnya LSM, perguruan tinggi dan berbagai pihak yang dapat membantu masyarakat dalam mengetahui strategi dalam pengelolaan pariwisata. Tetapi yang paling berhak adalah dinas pariwisata daerah dan provinsi yang selalu bekerja sama dengan pokdaerwis untuk melakukan sosialisasi terkait pariwisata kepada masyarakat desa secara keseluruhan, tetapi kita lebih khususkan kepada masyarakat dusun sendang sari”

Terlihat jelas bahwa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan merupakan dua komponen yang penting dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat desa. Melalui pendekatan Pemerintah Kalurahan, konsep pemberdayaan diwujudkan melalui serangkaian langkah yang terencana. Dalam hal ini, Pemerintah Kalurahan mengadopsi pendekatan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pariwisata. Tindakan ini sejalan dengan

pemahaman bahwa pemberdayaan dimulai dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait isu tertentu, dalam hal ini, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Masyarakat diajak untuk memahami manfaat dari pengembangan pariwisata bagi kesejahteraan mereka dan lingkungan setempat. Selain itu, melalui undangan kepada berbagai stakeholder seperti LSM dan perguruan tinggi, Pemerintah Kalurahan melibatkan pihak eksternal dalam upaya pemberdayaan. Pendekatan ini konsisten dengan konsep pemberdayaan yang mengakui pentingnya dukungan dari berbagai pihak dalam membantu masyarakat mencapai tujuan mereka. Melibatkan pihak-pihak eksternal yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pariwisata akan membantu meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat terkait pariwisata, peran dinas pariwisata daerah dan provinsi sangat signifikan. Dinas-dinas ini bekerja sama dengan Pokdarwis untuk menyosialisasikan isu-isu terkait pariwisata kepada masyarakat desa secara menyeluruh. Keterlibatan dinas pariwisata ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga terkait memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk menggerakkan proses pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan di Dusun Sendang Sari, terlihat adanya fokus khusus pada masyarakat di wilayah tersebut. Ini mengacu pada konsep pemberdayaan yang mengakui pentingnya memahami kebutuhan dan konteks khusus masyarakat yang diberdayakan. Dengan lebih berfokus pada masyarakat di dusun sendang sari, upaya

pemberdayaan menjadi lebih terarah dan relevan. Secara keseluruhan konteks ini, pemberdayaan masyarakat di Dusun Sendang Sari terkait pengembangan pariwisata memiliki dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah Kalurahan sebagai agen pemberdayaan menggunakan pendekatan yang inklusif dengan melibatkan pihak eksternal, termasuk dinas pariwisata, untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam mengelola destinasi wisata mereka sendiri. Hal ini berkontribusi pada upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, di mana kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.

Dalam wawancara lebih lanjut dengan Ibu Vina Aryani selaku Carik, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 17 Juli 2023) masyarakat kita memang sadar wisata tetapi sebagai Pemerintah Kalurahan kita membuat kesepakatan dengan masyarakat agar wisata bisa dapat juga menjaga lingkungan sekitar sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan pariwisata sebagai kegiatan ekonomi tetapi tetap menjaga alam di sekitar untuk tidak tercemar. Hal ini juga merupakan tugas Pokdarwis dalam membimbing masyarakat dengan menyadarkan masyarakat tentang menjaga lingkungan di tengah ramainya kegiatan wisata”

Dalam jawaban yang diberikan oleh Carik Terong, terlihat bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata lokal di desa ini telah melibatkan langkah-langkah konkret yang mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan dan keberlanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.

Pertama-tama, terlihat bahwa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat telah melakukan kesepakatan yang menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Konsep ini sesuai dengan pandangan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam hal ini, masyarakat diberdayakan untuk ikut berperan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan mereka. Upaya untuk menjaga lingkungan sekitar juga mencerminkan pemahaman tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Konsep ini mengakui bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya harus memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa lingkungan alam dan budaya yang menjadi daya tarik pariwisata tetap terjaga dan tidak tercemar. Oleh karena itu, kesepakatan untuk menjaga lingkungan adalah langkah penting dalam mengintegrasikan dimensi keberlanjutan ke dalam pengembangan pariwisata lokal.

Peran Pokdarwis (Pokok Pikiran Desa Wisata) dalam membimbing masyarakat untuk menjaga lingkungan juga konsisten dengan konsep pemberdayaan. Pokdarwis di sini bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat menyadari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata. Hal ini mencerminkan pendekatan pemberdayaan yang melibatkan kerjasama

antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan organisasi lokal untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat ini dapat dilihat sebagai contoh konkret dari bagaimana konsep pemberdayaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan diimplementasikan dalam konteks nyata. Pemerintah Kalurahan sebagai agen pemberdayaan telah menciptakan mekanisme kesepakatan dan pengawasan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan. Pokdarwis sebagai mitra Pemerintah Kalurahan berperan dalam membimbing masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dalam konteks pengembangan pariwisata. Keseluruhan inisiatif ini juga sejalan dengan konsep bahwa pengembangan pariwisata yang sukses memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, upaya pemberdayaan dan pengembangan pariwisata lokal di Desa Terong menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam kerangka teori.

Dalam wawancara mendalam dengan Pak Suryadi selaku Dukuh, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 17 Juli 2023) proses pemberdayaan masyarakat ini dilakukan oleh bagian pokdarwis yaitu bekerja sama dengan Kepala RPH Mangunan. Kami melakukan pendekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat diberikan pelatihan dari berbagai hal seperti pengelolaan wisata, parkir, dan penjagaan lingkungan sehingga masyarakat benar-benar

paham tentang pentingnya ekonomi dari wisata dan menjaga lingkungan. Karena wisata pinus pengger ini sudah mulai dibentuk sejak tahun 2016, maka kita sudah mulai dari awal melakukan pelatihan-pelatihan sehingga sampai sekarang masyarakat sudah paham cara berpariwisata dengan baik, karena wisata pinus pengger ini termasuk yang paling ramai di kalurahan terong”

Dari jawaban Dukuh, dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan dan pendidikan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Terong telah dijalankan dengan langkah konkret yang mencerminkan prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan dalam kerangka konseptual. Pertama-tama, kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis, dan Kepala RPH Mangunan sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang menekankan pentingnya kerjasama antar stakeholder. Ini menggambarkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memfasilitasi proses pengembangan pariwisata lokal. Dalam upaya pemberdayaan, pendekatan pelatihan yang diterapkan oleh Pokdarwis dan mitra-mitra lainnya (seperti Kepala RPH Mangunan, Pemerintah Kalurahan Terong, dan Ketua RT) adalah contoh konkret dari pemberian keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan yang melibatkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan individu atau kelompok untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan. Pelatihan yang diberikan mencakup pengelolaan wisata, parkir, dan penjagaan lingkungan,

menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata.

Pendekatan pendidikan dan pelatihan yang dimulai sejak tahun 2016 adalah contoh bagaimana pemberdayaan dalam konteks pengembangan pariwisata adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Ini sejalan dengan konsep bahwa pemberdayaan adalah usaha yang berkelanjutan dan melibatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara bertahap. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini memungkinkan masyarakat untuk memahami cara berpariwisata dengan baik, termasuk mengerti pentingnya ekonomi dari wisata dan menjaga lingkungan.

Fakta bahwa wisata pinus pengger telah menjadi salah satu destinasi wisata yang paling ramai di Kalurahan Terong menunjukkan kesuksesan dari upaya pemberdayaan dan pendidikan yang telah dijalankan. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat telah berhasil menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan tersebut dan berhasil mengelola destinasi wisata dengan baik. Ini juga menunjukkan bahwa konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi dan lingkungan, dapat diwujudkan melalui kolaborasi aktif dan pendidikan yang tepat. Secara keseluruhan, jawaban dari Dukuh ini menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kalurahan Terong telah dijalankan dengan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam kerangka

teori. Upaya kolaboratif, pendekatan pelatihan, dan fokus pada aspek ekonomi dan lingkungan sesuai dengan konsep pemberdayaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

1. Menciptakan suasana kondusif di masyarakat (enabling)

Menciptakan suasana kondusif di masyarakat (*Enabling*) dalam pengembangan pariwisata di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, tercermin dalam serangkaian langkah yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan dan berbagai stakeholder terkait. Tujuan dari *enabling* ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep "*enabling*" ini melibatkan beberapa komponen yang saling terintegrasi dalam strategi pengembangan pariwisata di Desa Terong: *Pertama*, pendidikan dan pengetahuan. Pemerintah Kalurahan berkolaborasi dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi pariwisata, pengelolaan lingkungan, serta keterampilan terkait pengembangan tempat wisata.

Kedua, partisipasi aktif. Suasana kondusif di masyarakat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajak untuk berperan serta

dalam perencanaan, pengelolaan, dan promosi wisata. Dengan begitu, mereka merasa memiliki keterlibatan langsung dalam seluruh proses pengembangan tersebut.

Ketiga, pemberdayaan. Masyarakat diberdayakan melalui penyediaan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan pariwisata. Program pelatihan dan pendampingan diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti mendesain tempat wisata, mengelola ekonomi, dan menjaga lingkungan.

Keempat, kerjasama dan kolaborasi. Pemerintah Kalurahan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan perguruan tinggi, guna mendukung pengembangan pariwisata. Melalui kolaborasi ini, terjamin adanya sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Kelima, keseimbangan. Konsep "enabling" juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pendekatan berkelanjutan diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan keberlanjutan budaya.

Uundang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat dihubungkan dengan konsep "enabling" yang sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat

dalam pengambilan keputusan. Di Desa Terong, *enabling* ini diimplementasikan melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Pasal 3 ayat (1) UU Desa mengakui hak masyarakat setempat dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh konkret, dalam wawancara dengan Ketua RT di atas, ia menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilakukan. Langkah-langkah seperti pelatihan, pendekatan berbasis masyarakat, dan partisipasi dalam pengelolaan wisata pinus pengger telah dilakukan sejak tahun 2016. Melalui upaya ini, masyarakat diberikan keterampilan dalam pengelolaan wisata, pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan, serta aspek lain yang mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menciptakan suasana kondusif di masyarakat (*enabling*) dalam pengembangan pariwisata di Desa Terong adalah implementasi nyata dari kerangka teori yang mencakup pendidikan, partisipasi, pemberdayaan, kerjasama, dan keseimbangan. Konsep ini juga sejalan dengan semangat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam wawancara mendalam dengan Pak Parno salah satu Pengelola Ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 18 Juli 2023) kegiatan pariwisata ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, Pemerintah Kalurahan, LSM, perguruan tinggi, Pokdarwis dan masyarakat luas khususnya di Kalurahan Terong. Oleh karena itu, cara kita yang paling utama adalah menjaga hubungan antara kelompok-kelompok ini, apalagi masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat mengalami konflik karena saling mengklaim soal kepemilikan atau lapangan kerja sehingga Pemerintah Kalurahan membuat strategi

yakni dengan mengumpulkan seluruh masyarakat terkhusus di dusun sendang untuk mensosialisasikan bagaimana cara bekerjasama secara kolaboratif baik antara masyarakat maupun dengan pemerintah ataupun LSM. Yang terpenting adalah wisata pinus pengger ini bisa berjalan lancar dan memberikan pendapatan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat”

Jawaban informan yang telah diungkapkan dapat dianalisis melalui prisma kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam konteks ini, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga memiliki peran yang terintegrasi. Berikut adalah analisis dari jawaban informan yang dikaitkan dengan kerangka teori dan UU Desa. Pertama, informan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat sebagai unsur utama dalam pengembangan pariwisata. Melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Pemerintah Kalurahan, LSM, perguruan tinggi, Pokdarwis, dan masyarakat luas, mencerminkan prinsip partisipasi dalam kerangka teori. Konsep ini juga selaras dengan semangat UU Desa yang memberi mandat kepada masyarakat dalam pengelolaan urusan pemerintahan desa. Kedua, kerjasama dan kolaborasi menjadi aspek krusial dalam upaya menjaga hubungan yang harmonis antara kelompok-kelompok terlibat. Dalam kerangka teori, kerjasama lintas sektor dan lintas pihak ditekankan untuk mencapai keberhasilan pengembangan pariwisata. Penerapan ini sesuai dengan semangat UU Desa yang menggalakkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga, konsep pemberdayaan masyarakat tampak dalam strategi Pemerintah Kalurahan yang mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan pendekatan kolaboratif. Ini mencerminkan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pariwisata, seperti yang

dicontohkan dalam kerangka teori. UU Desa juga mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan program pembangunan. Keempat, pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata tercermin dalam tujuan informan untuk menjaga kelancaran wisata pinus pengger sekaligus memberi pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam kerangka teori. UU Desa juga mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Kelima, informan mengakui potensi konflik dalam pengembangan pariwisata dan menggambarkan upaya Pemerintah Kalurahan dalam mengelola potensi tersebut melalui strategi sosialisasi. Konsep pengelolaan konflik dalam kerangka teori mendukung pendekatan ini. UU Desa juga menegaskan perlunya penghindaran konflik dan promosi kerjasama harmonis dalam pembangunan desa.

Secara keseluruhan jawaban informan, konsep-konsep dalam kerangka teori dapat ditemukan secara nyata dan relevan. Penerapan-penerapan tersebut juga sesuai dengan semangat dan prinsip yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberikan landasan hukum bagi partisipasi aktif masyarakat, kerjasama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, keseimbangan, dan pengelolaan konflik dalam pembangunan desa.

Dalam wawancara mendalam dengan Sumar selaku Pengelola ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) Tugas kita adalah membina dan mengembangkan potensi sumber daya wisata dan keterampilan masyarakat. Dalam hal ini, kita ingin agar masyarakat tida adanya konlik horizontal di antara mereka. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan kita bekerja sesuai regulasi dan aturan. Tetapi karena sasaran kita adalah keajahteraan masyarakat dari pendapatan ekonomi pariwisata itu sendiri, maka kita perlu pendekatan dengan masyarakat terkait bagaimana berjalannya sebuah program yang dapat menjamin keadilan dan kesetaraan antara masyarakat itu yang paling penting”

Jawaban tersebut dapat dianalisis berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pengelolaan menekankan pada pentingnya pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya wisata dan keterampilan masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan konsep pemberdayaan dalam kerangka teori. Mengembangkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat adalah prinsip utama dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. selanjutnya, perhatian pada pencegahan konflik horizontal antara masyarakat menunjukkan kesadaran akan potensi konflik yang bisa muncul dalam pengembangan pariwisata. Konsep pengelolaan konflik dalam kerangka teori mendukung upaya ini. UU Kepariwisataan juga menekankan perlunya menjaga ketentraman dan ketertiban dalam industri pariwisata. Selain itu, penekanan pada kerja sesuai dengan regulasi dan aturan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencerminkan pemahaman tentang pentingnya pengaturan hukum dalam pengembangan pariwisata. Hal ini sejalan dengan konsep pengaturan dalam kerangka teori, di mana regulasi

diperlukan untuk mengatur aktivitas pariwisata guna mencegah dampak negatif dan menjaga keberlanjutan.

Pemberian perhatian pada keadilan dan kesetaraan antara masyarakat dalam program pengembangan pariwisata menunjukkan kesadaran terhadap aspek sosial dalam pengelolaan pariwisata. Prinsip ini sejalan dengan konsep keberlanjutan sosial dalam kerangka teori. UU Kepariwisataan juga mencantumkan prinsip keberlanjutan sosial dalam rangka pembangunan pariwisata yang inklusif. Konsep-konsep yang ada dalam kerangka konseptual terlihat tercermin dalam pandangan dan pendekatan ketua Pokdarwis. Dia memahami pentingnya pemberdayaan masyarakat, pengelolaan konflik, pengaturan hukum, dan keadilan sosial dalam pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu, dia juga mengacu pada UU Kepariwisataan sebagai panduan untuk menjalankan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang.

Data yang membuktikan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Kesejahteraan Masyarakat

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Keluarga Pra Sejahtera	305 Keluarga
2	Keluarga Sejahtera 1	501 Keluarga
3	Keluarga Sejahtera 2	810 Keluarga
4	Keluarga Sejahtera 3	200 Keluarga
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	40 Keluarga
TOTAL		1.856 Keluarga

Sumber: Monografi Kalurahan Terong 2022

Dalam wawancara mendalam dengan Pak Miswanto selaku tokoh masyarakat dan Ketua RT ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) kami sebagai masyarakat tentu saja ada kecemburuan sosial, karena misalnya ada warga yang dipilih untuk menjadi tukang parkir tapi yang lain tidak malah keluar daerah untuk mencari pekerjaan sehingga kami berharap Pemerintah Kalurahan bisa dapat mengelola pariwisata Pinus Pengger ini dengan adil. Kami juga minta agar Pokdarwis melihat masyarakat yang kekurangan ekonomi dapat melihat masyarakat yang kesulitan ekonomi dapat dipekerjakan di dalam.

Berdasarkan jawaban informan dari masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama-tama, adanya kecemburuan sosial yang disebutkan oleh warga mencerminkan dinamika sosial yang mungkin terjadi dalam konteks pengembangan pariwisata. Konsep kecemburuan sosial dalam kerangka konseptual menyoroti potensi terjadinya perasaan iri atau tidak puas antara anggota masyarakat akibat perbedaan perlakuan atau manfaat dari aktivitas pariwisata. Dalam hal ini, warga menyampaikan kekhawatiran tentang pemilihan tukang parkir yang bisa memicu perasaan ketidakpuasan.

Selanjutnya permintaan agar Pemerintah Kalurahan mengelola pariwisata dengan adil mencerminkan pentingnya aspek keadilan dalam pengembangan pariwisata. Konsep keadilan dalam kerangka teori menunjukkan perlunya memastikan distribusi manfaat yang merata bagi seluruh anggota masyarakat dari aktivitas pariwisata. Permintaan ini sejalan dengan semangat keberlanjutan sosial dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selain itu, harapan agar Pokdarwis memperhatikan masyarakat yang kekurangan ekonomi dan memberi mereka peluang kerja di dalam aktivitas pariwisata menunjukkan

kesadaran terhadap aspek inklusivitas dalam pengelolaan pariwisata. Konsep inklusivitas dalam kerangka konseptual menggarisbawahi pentingnya memperhitungkan masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak negatif atau tidak mendapat kesempatan yang sama dalam kegiatan pariwisata.

Dengan demikian informan tersebut mengungkapkan kekhawatiran, harapan, dan permintaan terkait pengelolaan pariwisata di daerah mereka. Analisis berdasarkan kerangka teori menunjukkan bahwa warga mengidentifikasi isu-isu yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan, keadilan, dan inklusivitas dalam pengembangan pariwisata. UU Kepariwisataan juga menekankan pada keberlanjutan sosial dan pengelolaan yang adil dalam konteks pariwisata.

Salah satu contoh data kemiskinan dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 3.4
Data Tingkat Kemiskinan

No	Nama Padukuhan	Jumlah (KK)	Persentase(%)
1	Padukuhan Pancuran	76 KK	17%
2	Padukuhan Sandang Sari	68 KK	15%
3	Padukuhan Terong I	30 KK	7%
4	Padukan Rejosari	25 KK	5%
5	Padukuhan Saradan	51 KK	11%
6	Padukuan Pencit Rejo	74 KK	16%
7	Padukuhan Kebokuning	37 KK	8%
8	Padukuhan Terong II	61 KK	13%
9	Padukuhan Ngenep	37 KK	8%

TOTAL	459 KK	100
--------------	---------------	------------

Sumber: Monografi Kalurahan Terong 2022

Dengan membandingkan tabel tersebut dengan jawaban informan mengenai kecemburuhan sosial dan harapan terhadap pengelolaan pariwisata yang adil, beberapa hubungan dapat diidentifikasi. Pertama, informan mengungkapkan adanya kecemburuhan sosial antara warga yang terlibat dalam pekerjaan pariwisata. Tabel tersebut menunjukkan bahwa padukuhan "Sandang Sari" memiliki jumlah KK yang signifikan (68 KK atau 15% dari total) dan padukuhan "Pancuran" (76 KK atau 17% dari total). Jumlah ini mencerminkan lebih banyaknya warga yang terlibat dalam sektor pariwisata, yang dapat memicu perasaan cemburu dari warga padukuhan lain yang tidak sebanyak itu.

Kedua, informan juga berharap agar pengelolaan pariwisata dilakukan dengan adil. Dalam konteks ini, distribusi jumlah KK dalam setiap padukuhan mungkin mencerminkan perhatian terhadap kesetaraan dalam pemberian peluang kerja dan manfaat ekonomi. Meskipun angka persentase tidak sepenuhnya mencerminkan distribusi pendapatan atau peluang kerja, tetapi padukuhan dengan jumlah KK yang signifikan mungkin membutuhkan perhatian khusus dalam upaya untuk mendistribusikan manfaat pariwisata secara merata.

Ketiga, informan menyampaikan harapan agar masyarakat yang kekurangan ekonomi dan kesulitan ekonomi dapat terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Jika terdapat padukuhan atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki proporsi KK yang lebih besar dan dianggap kurang sejahtera, pengelolaan pariwisata dapat dirancang dengan

memperhatikan kebutuhan dan potensi mereka. Hal ini dapat mencakup pelatihan keterampilan dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Secara keseluruhan, tabel distribusi KK dalam padukuhan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait struktur sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Informasi ini dapat membantu Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam merancang strategi pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif, merata, dan memberdayakan seluruh masyarakat.

2. Bimbingan dan dukungan (*supporting*)

Bimbingan dan dukungan dalam kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata adalah upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan kelompok lokal seperti Pokdarwis, untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat terkait pariwisata. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi kendala, meningkatkan keterampilan, dan memperluas pemahaman masyarakat tentang pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, konsep ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pendidikan dan pelatihan diberikan kepada masyarakat untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang manajemen destinasi, promosi pariwisata, dan aspek lain yang relevan. Perguruan tinggi seperti UAD juga turut berperan dalam memperkaya pengetahuan ini.

Kedua, melalui sosialisasi dan penyuluhan, informasi tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan disampaikan kepada masyarakat. LSM dan Pemerintah Kalurahan berperan dalam menyebarluaskan kesadaran ini guna melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya, masyarakat diberikan akses terhadap sumber daya yang mendukung pengembangan pariwisata, seperti pendanaan atau infrastruktur. Pemerintah daerah dan Pokdarwis membantu memfasilitasi akses ini. Selain itu, konsep ini melibatkan pengembangan keterampilan masyarakat, baik teknis maupun sosial.

Masyarakat dilatih untuk menjadi pemandu wisata yang terampil atau memiliki kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam industri pariwisata. Tidak hanya itu, konsep "Bimbingan dan Dukungan" juga melibatkan bimbingan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat diberi panduan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di lingkungan mereka, melalui forum partisipatif dan diskusi bersama. Dalam konteks UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, konsep ini mendukung peran Pemerintah Kalurahan dalam memberikan panduan dan dukungan kepada masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Program pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi dapat diorganisir oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memastikan prinsip-prinsip pemberdayaan, keberlanjutan, dan keadilan sesuai dengan semangat UU Desa.

Dalam wawancara mendalam dengan Dahlia selaku masyarakat, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) dalam pengelolaan wisata pinus pengger ini, tentu saja kami harus mendapatkan bimbingan baik secara teknis maupun secara pemahaman, karena itu ada kampus dan juga LSM dan dinas pariwisata yang ikut membuat sosialisasi kepada kami. Mereka mengajarkan kami bagaimana manajemen dan pengelolaan yang baik. Mereka juga memberikan support melalui dukungan materil sehingga kegiatan wisata ini boleh berjalan dengan baik sampai sekarang. Kalau soal data-data bisa ditanyakan ke Pemerintah Kalurahan”

Dalam konteks pengelolaan wisata pinus pengger, informan menunjukkan adanya kerjasama yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat. Pernyataannya mengungkapkan bahwa dalam upaya mengelola wisata ini, mereka mendapatkan bimbingan teknis dan pemahaman yang baik. Pihak-pihak yang terlibat mencakup kampus, LSM, dan dinas pariwisata. Melalui kolaborasi ini, mereka diajarkan mengenai manajemen dan pengelolaan yang efektif, mengarah pada pengelolaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam sektor pariwisata juga tercermin dalam pernyataan informan. Mereka mengakui bahwa bimbingan yang mereka terima membantu mereka memahami praktik-praktik terbaik dalam industri pariwisata. Ini mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola wisata, yang merupakan aspek penting dari pembangunan berkelanjutan dalam sektor ini.

Selain dukungan dalam bentuk pengetahuan, pernyataan tersebut juga menyebutkan adanya dukungan materil. Aktor-aktor terkait memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya yang mendukung operasional wisata. Dukungan ini memberikan dasar yang kuat untuk menjaga kualitas fasilitas dan lingkungan wisata, yang pada

gilirannya mendukung pengalaman positif bagi pengunjung. Sosialisasi dan informasi juga merupakan bagian penting dalam pernyataan informan. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek teknis dan manajemen wisata. Hal ini penting untuk menjaga kesadaran tentang praktik-praktik berkelanjutan dan juga membantu masyarakat setempat berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan wisata.

Keterbukaan dan transparansi juga diakui dalam pernyataan tersebut. Fakta bahwa informan merujuk pada Pemerintah Kalurahan sebagai sumber data menunjukkan adanya upaya untuk memberikan akses yang mudah terhadap informasi. Ini mendukung transparansi dalam pengelolaan wisata dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan pengawasan. Secara keseluruhan, pernyataan informan mencerminkan bagaimana implementasi berbagai konsep dalam kerangka konseptual, seperti partisipasi aktor, pendidikan dan pelatihan, dukungan materiil, sosialisasi, informasi, serta transparansi, dapat ditemukan dalam praktik pengelolaan wisata pinus pengger. Hal ini mengilustrasikan upaya kolaboratif yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata.

Selain itu, dalam wawancara mendalam dengan Ibu Vina Aryani selaku Carik, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 17 Juli 2023) kalau soal dukungan kami memang didukung oleh masyarakat untuk menjalankan program ini. Kami sebagai Pemerintah Kalurahan merasa bahwa masyarakat sangat mendukung program ini sehingga kami melibatkan berbagai pihak dalam membimbing masyarakat terkait pengelolaan pariwisata ini. Bisa dilihat bahwa ada beberapa kampus yang sering

mengadakan pelatihan di tempat kami terkait dengan manajemen pengelolaan di desa”

Pernyataan informan mencerminkan aspek penting dalam kerangka konseptual terkait dukungan dari masyarakat dan partisipasi aktor dalam pengelolaan pariwisata. Informan menyatakan bahwa mereka merasakan dukungan yang kuat dari masyarakat terkait program pengelolaan pariwisata di desa mereka. Dukungan ini merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata. Dukungan masyarakat merupakan fondasi utama dalam keberhasilan program pengelolaan pariwisata. Ketika masyarakat merasa terlibat dan mendukung program tersebut, hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Dalam konteks ini, informan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kalurahan merasa bahwa dukungan masyarakat sangat kuat, dan hal ini membantu mereka merancang dan melaksanakan program pengelolaan pariwisata dengan lebih baik.

Pentingnya partisipasi aktor juga tercermin dalam pernyataan informan. Mereka merujuk pada kampus-kampus yang sering mengadakan pelatihan terkait manajemen pengelolaan di desa mereka. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan dan lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan pariwisata. Partisipasi aktor eksternal seperti lembaga pendidikan juga memperkaya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, kehadiran pelatihan dari berbagai pihak, termasuk kampus-kampus, mencerminkan penerapan konsep pendidikan dan pelatihan dalam

pengelolaan pariwisata. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya membantu masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip manajemen yang baik, tetapi juga meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola aspek-aspek operasional wisata secara efektif.

Keterlibatan pihak eksternal seperti kampus juga berkontribusi terhadap pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan partisipasi aktor yang penting dalam pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata. Secara keseluruhan, pernyataan informan mencerminkan bagaimana elemen-elemen dari kerangka konseptual, seperti dukungan masyarakat, partisipasi aktor, dan pendidikan serta pelatihan, dapat diidentifikasi dalam konteks pengelolaan pariwisata yang dibahas. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun kerjasama yang kuat dan berkelanjutan dalam upaya mengelola pariwisata dengan baik.

C. Pengelolaan Pariwisata

Wisata Pinus Pengger di Dusun Sandangsari, Kelurahan Terong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu contoh pengembangan wisata berbasis alam yang memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat setempat. Terbentuknya wisata ini pada awalnya adalah hasil inisiatif dari anak-anak muda dusun Sandangsari pada bulan Januari tahun 2016, yang terinspirasi oleh keberhasilan wisata Mangunan. Para pemuda ini memiliki niat untuk membuka wisata di kawasan hutan lindung yang ada di desa mereka, yakni Pinus Pengger. Meskipun dalam perjalannya terdapat kendala dalam proses perizinan

pengelolaan hutan lindung, namun setelah melewati proses perizinan yang cukup panjang dan mendapatkan persetujuan dari Koperasi Notowono yang memiliki kewenangan pengelolaan wisata di kawasan tersebut, wisata Pinus Pengger akhirnya diresmikan pada tanggal 7 April 2016.

Dalam pengelolaan wisata tersebut, terdapat keterlibatan Koperasi Notowono dan Kelompok Sadar Wisata Dusun Sandangsari sebagai operator wisata. Pengelolaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, seperti Peraturan Gubernur No 84 tahun 2016 tentang ekowisata dan Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2018 tentang kerja sama dan perizinan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung. Selain itu, nilai bagi hasil juga diatur dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Koperasi Notowono, di mana 75% pendapatan diberikan kepada koperasi dan 25% kepada Pemerintah DIY. Dalam rentang waktu 2016-2022, pengelolaan wisata Pinus Pengger telah melengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti spot foto, area camping, ayunan, gazebo, toilet, mushola, serta warung makan/minum. Pengelolaan wisata ini juga mencatat data pengunjung dan pendapatan yang signifikan. Data tersebut menggambarkan peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah pengunjung mencapai 33.910 orang dengan pendapatan sekitar Rp 759.304.700, dan pada tahun 2019, jumlah pengunjung meningkat menjadi 74.290 orang dengan pendapatan Rp 2.028.381.600. Dari data tersebut, terlihat bahwa wisata Pinus Pengger

berhasil menjadi daya tarik yang menguntungkan bagi masyarakat setempat serta mampu menarik minat wisatawan.

Pengelolaan wisata Pinus Pengger ini mencerminkan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata. Melalui penguatan kapasitas dan kerja sama dengan pihak terkait, masyarakat setempat berhasil mengelola potensi alam yang dimiliki dengan memanfaatkan regulasi yang ada. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori sebelumnya, di mana pemberdayaan melibatkan penguatan kapasitas, pendukung, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan perguruan tinggi.

Upaya menggali potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata telah menjadi salah satu alternatif yang menarik perhatian. Dalam konteks ini, Dukuh Sendang Sari, yang terletak di Kalurahan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, memiliki potensi wisata alam yang menjanjikan, yakni hutan Pinus Pengger. Pariwisata memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dalam hal ekonomi, pendidikan, serta pelestarian lingkungan. UU Nomor 6 Tahun 2014 berfokus pada bagaimana pengelolaan pariwisata di wilayah tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memiliki kaitan erat dengan pengelolaan pariwisata karena mengatur tentang kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat lokal, termasuk pengelolaan potensi wisata.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan di wilayahnya, termasuk pengelolaan potensi wisata. Pasal 6 UU tersebut menyebutkan bahwa desa memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak kewenangan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki di wilayahnya. Pada bagian yang berkaitan dengan pengelolaan wisata, desa dapat melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Ini bisa mencakup penyusunan rencana pengembangan pariwisata, pengaturan zonasi kawasan wisata, penataan fasilitas wisata, promosi destinasi, serta pengelolaan aspek lingkungan dan budaya.

Konteks pengelolaan pariwisata, dapat dijelaskan bahwa Dusun Sendang di Kelurahan Terong, Kabupaten Bantul mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini melibatkan peran aktif Pemerintah Kalurahan dalam mengatur dan mengawasi pengembangan potensi wisata, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata. Dengan merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014, Dusun Sendang dapat memastikan bahwa pengelolaan pariwisata dilakukan dengan berlandaskan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan lingkungan. Ini akan mendukung pengembangan

pariwisata yang berdampak positif bagi masyarakat setempat dan sekitarnya, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di wilayah tersebut.

Dalam wawancara mendalam dengan Pak Sumar (Pengelolala), ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) sejak tahun 2015 kami kelompok sadar wisata sebagai pengelola wisata Pinus Pengger, hingga saat ini, kami terus melakukan pengembangan wisata, mulai dari area parkir, akses jalan, tempat rekreasi, kamar mandi dan tempat-tempat santai lainnya, walau itu kami akan benahi per tahap ketika ada yang memang perlu direparasi. Berbagai macam fasilitas wisata terus kami bangun seperti spot foto, jasa foto dan rumah makan. Pelibatan kelompok masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan wisata sebagai juga terus kami tingkatkan sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan, peningkataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa”

Jawaban informan di atas menunjukkan beberapa hal yang berkaitkan dengan sejarah dan fasilitas yang dibangun dalam menunjang pariwisata Pinus Pengger. Pengelolaan pariwisata di dusun Sendang, Kalurahan Terong, Kabupaten Bantul menggambarkan implementasi pemberdayaan masyarakat dalam praktik nyata. Sejak tahun 2015, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) telah berperan sebagai pengelola wisata Pinus Pengger di wilayah tersebut. Dalam usahanya untuk mengembangkan wisata, Pokdarwis secara bertahap membangun fasilitas-fasilitas seperti area parkir, akses jalan, tempat rekreasi, kamar mandi, dan tempat-tempat santai. Pemberdayaan ini terlihat dari upaya mereka dalam melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan wisata. Masyarakat desa tidak hanya menjadi pengguna fasilitas, tetapi

juga berkontribusi dalam membangun dan mengelola aspek-aspek wisata tersebut.

Konsep masyarakat sebagai kesatuan yang berinteraksi, memiliki identitas bersama, dan adat istiadat tertentu tercermin dalam upaya Pokdarwis untuk melibatkan dan memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat desa bukan hanya sekadar pengamat, tetapi turut aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Namun, untuk menganalisis lebih lanjut, diperlukan pemahaman lebih dalam tentang sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan peran mereka dalam mengelola pariwisata. Desa Sendang sebagai entitas hukum memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata. Konsep desa sebagai wadah pengaturan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tercermin dalam upaya Pokdarwis untuk menghargai hak asal usul dan prakarsa masyarakat desa dalam pengembangan wisata. Namun, analisis lebih lanjut perlu mempertimbangkan sejauh mana otonomi desa dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan pariwisata, serta bagaimana kerjasama antara Pokdarwis dan Pemerintah Kalurahan dalam prakteknya.

Dalam konteks pariwisata, konsep pariwisata sebagai perjalanan dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata tercermin dalam upaya Pokdarwis dalam membangun fasilitas wisata yang beragam. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek sosial dan budaya, seiring dengan tujuan pariwisata yang ditegaskan dalam undang-undang. Meskipun demikian, analisis lebih

mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana upaya pengelolaan pariwisata ini menangani dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Secara keseluruhan, pengelolaan pariwisata di dusun Sendang, Kalurahan Terong, Kabupaten Bantul memiliki keterkaitan yang signifikan dengan konsep-konsep pemberdayaan, masyarakat, desa, dan pariwisata dalam kerangka teori yang telah Anda berikan. Namun, untuk memahami dampak dan keberhasilan praktik-praktik ini secara holistik, perlu analisis lebih mendalam terkait partisipasi masyarakat, efek jangka panjang, serta keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian budaya, dan lingkungan.

Dalam wawancara mendalam dengan Ibu Vina Aryani selaku Carik, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 17 Juli 2023) proses pengelolaan wisata ini, kami sebagai Pemerintah Kalurahan berperan langsung dengan BPD dalam mengontrol pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Pkdarwis dengan masyarakat. Kami menekankan agar pengelolaan ini bisa transparan dan penuh tanggung jawab agar masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan ini bisa merasakan hasil dari pengelolaan pariwisata seperti kesejahteraan ekonomi dan lain-lain. Dengan demikian kami bisa meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dll, dari PADes yang kami miliki yang paling besar memang dari pariwisata. Namun pengelolaan tersebut bukan dibawah nawung Pemerintah Kalurahan Tetapi mereka bersama Koperasi Notowono”

Wawancara tersebut memberikan informasi tambahan yang relevan dalam konteks pengelolaan pariwisata di dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, Kabupaten Bantul. Analisis lebih lanjut dengan menggunakan kerangka teori yang telah disediakan adalah sebagai berikut: Konsep pemberdayaan masyarakat tercermin dalam peran aktif Pemerintah

Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengontrol dan mengawasi pengelolaan wisata yang dilakukan oleh Pokdarwis dengan masyarakat. Pemerintah Kalurahan, melalui perwakilannya (BPD), berupaya untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berlangsung transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pengelolaan wisata dengan memastikan bahwa mereka merasakan hasil dari pengelolaan tersebut, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi dan manfaat lainnya.

Dalam kerangka konsep desa, Pemerintah Kalurahan memiliki peran sentral sebagai entitas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pernyataan Carik menggambarkan bagaimana Pemerintah Kalurahan secara aktif terlibat dalam mengelola dan mengawasi aktivitas pariwisata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan pengelolaan pariwisata, yang juga memperoleh manfaat dari Pendapatan Asli Desa (PADes), memberikan peluang untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks konsep pariwisata menggarisbawahi pentingnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan pariwisata. Dengan menyebut bahwa PADes yang diperoleh dari pariwisata merupakan sumber pendapatan yang signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan wisata telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi desa. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang secara tidak langsung mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kalurahan berperan penting dalam mengawal pengelolaan wisata demi transparansi dan manfaat bagi masyarakat, serta dalam memanfaatkan pendapatan dari pariwisata untuk pembangunan fasilitas publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat

Dalam wawancara lebih lanjut lagi bersama Pak Wiswanto selaku Ketua RT, ia mengatakan bahwa:

Kami sebagai masyarakat sebenarnya hanya ikut dipekerjakan seperti tukang parkir, Tour Guide, atau penjaga lokasi wisata, yang lain juga dipekerjakan sebagai pengontrol. Kalau pengelolaan itu dilakukan oleh Pokdarwis dan Pemerintah Kalurahan. Kami berharap agar pengelolaan pariwisata ini bisa membantu kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Karena beberapa orang yang belum mendapatkan pekerjaan dari sini malah keluar daerah untuk mencari pekerjaan, padahal dana desa besar dan pendapatan desa dari pariwisata itu besar. Kami hanya harap agar tidak ada korupsi sehingga semua berjalan dengan baik.

Pernyataan masyarakat yang diwawancarai memberikan sudut pandang yang berbeda terkait pengelolaan pariwisata di dusun Sendang, Kalurahan Terong, Kabupaten Bantul. Mari kita analisis pernyataan tersebut dengan menggunakan kerangka teori yang telah disediakan: Dalam konteks konsep pemberdayaan, pernyataan masyarakat mencerminkan peran mereka dalam aktivitas pengelolaan pariwisata. Masyarakat tersebut menggambarkan bagaimana mereka terlibat dalam berbagai aspek pengelolaan, seperti menjadi tukang parkir, tour guide, penjaga lokasi wisata, dan pengontrol. Peran ini dapat dianggap sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, di mana masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari sektor pariwisata. Hal ini juga sesuai dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pada memberikan

kemampuan, keterampilan, dan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam perspektif konsep desa, pernyataan masyarakat mencerminkan bagaimana Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata. Pengelolaan tersebut diakui dilakukan oleh Pokdarwis dan Pemerintah Kalurahan. Hal ini sejalan dengan konsep desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis memiliki peran sebagai pengelola dan koordinator aktivitas pariwisata, termasuk dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan tersebut. Dalam kerangka konsep pariwisata, pernyataan masyarakat menyoroti harapan mereka terhadap manfaat ekonomi dari pengelolaan pariwisata. Masyarakat berharap bahwa pengelolaan pariwisata dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana pariwisata diharapkan dapat memberikan peluang pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Adanya kesadaran bahwa beberapa orang terpaksa mencari pekerjaan di luar daerah karena belum mendapatkan pekerjaan dari sektor pariwisata menunjukkan pentingnya peran pariwisata dalam memberikan lapangan pekerjaan lokal.

Dalam perspektif konsep pemberdayaan dan konsep desa, masyarakat juga mengemukakan keinginan untuk menjaga transparansi

dan mencegah korupsi dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan pariwisata untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Keinginan ini juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa konsep pemberdayaan dan pembangunan desa dapat berlangsung dengan adil dan efektif. Secara keseluruhan, pernyataan masyarakat dalam wawancara tersebut menggambarkan bagaimana mereka melihat peran Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis, dan diri mereka sendiri dalam pengelolaan pariwisata. Pernyataan ini selaras dengan konsep pemberdayaan, desa, dan pariwisata dalam kerangka teori yang telah disediakan, di mana masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat ekonomi dan pemberdayaan melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan pariwisata, serta upaya untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses tersebut.

D. Manfaat Pariwisata bagi Masyarakat

Pariwisata memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengulaskan dampak positif pariwisata terhadap masyarakat setempat dan ekonomi daerah, dengan mengacu pada data pengunjung dan pendapatan yang tercatat pada profil Wisata Pinus Pengger. Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata akan menjadi kerangka teoretis utama untuk memahami bagaimana

pengembangan destinasi pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan lokal.

Pengembangan Wisata Pinus Pengger di Desa Terong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan cerminan nyata bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata dapat diwujudkan. Data pengunjung dan pendapatan yang tercatat selama beberapa tahun menunjukkan bahwa objek wisata ini mampu menarik perhatian wisatawan dan secara bersamaan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengunjung dan pendapatan dari tahun 2017 hingga 2019 menggambarkan pertumbuhan dalam industri pariwisata.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks pariwisata berfokus pada penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan Wisata Pinus Pengger pada tahun 2019, yang mencapai 38% dan 41% masing-masing, dapat diartikan sebagai indikator keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Kontribusi ekonomi ini bukan hanya berasal dari pendapatan langsung dari wisatawan, tetapi juga dari peluang pekerjaan yang dihasilkan, seperti pemandu wisata, pengelola fasilitas, dan usaha-usaha lain yang mendukung sektor pariwisata.

Manfaat pariwisata bagi masyarakat, seperti yang tercermin dari data pengunjung dan pendapatan Wisata Pinus Pengger yang tertera pada profil Wisata Pinus Pengger, dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan dari tahun ke tahun. Data tersebut

menggambarkan dampak positif pariwisata terhadap masyarakat setempat dan ekonomi daerah secara umum, sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan dari tahun 2017 hingga 2019 yang signifikan menunjukkan bahwa wisata Pinus Pengger mampu menarik minat wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Peningkatan pengunjung sebesar 38% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dan pendapatan sebesar 41% menunjukkan adanya pertumbuhan dalam industri pariwisata. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang melibatkan penguatan kapasitas masyarakat, di mana peningkatan kunjungan dan pendapatan berarti masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki kontrol atas sumber daya yang dimiliki.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin banyak juga kebutuhan akan layanan dan fasilitas di sekitar objek wisata. Ini dapat menciptakan peluang kerja baru seperti pemandu wisata, penjaga kebersihan, pengelola warung makan, serta berbagai usaha kecil dan menengah yang mendukung industri pariwisata. Namun, dapat dilihat bahwa tahun 2020, 2021, 2022 hingga saat ini mengalami penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan yang signifikan, disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghantam industri pariwisata global. Ini mencerminkan ketergantungan wisata terhadap faktor eksternal, serta perlunya upaya diversifikasi dan ketahanan dalam pengelolaan pariwisata

agar masyarakat tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Secara keseluruhan, data pengunjung dan pendapatan Wisata Pinus Pengger menggambarkan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi, peluang kerja, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks lokal. Peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan mencerminkan kontribusi positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan yang telah dijelaskan dalam kerangka konseptual.

Dalam wawancara mendalam dengan Pak Sumar selaku Pengelola, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) kita punya data di tahun 2017 sampai 2019 mas, pengunjung sebesar 38% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dan pendapatan sebesar 41% menunjukkan adanya pertumbuhan dalam industri pariwisata. Artinya, peningkatan pengunjung terus terjadi hingga saat ini. Dari situ, kita akan terus perbaiki semua fasilitas dan mempertahankan keasrian lingkungan yang ada di sekitar lokasi wisata. Nah, harapan kita dari peningkatan yang terus menerus masyarakat mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya yah, soal ekonomi itu udah pasti, terus masyarakat juga bisa menemukan lapangan pekerjaan yang kita buka di sini yo antara lain juru parkir, penjaga dan lain-lain, itu kita bayar per orang 80-100 rincu perhari”

Pernyataan yang disampaikan oleh Pokdarwis dalam wawancara tersebut membahas konsep manfaat pariwisata bagi masyarakat dari perspektif pengelola wisata. Mari kita analisis pernyataan tersebut dengan menggunakan kerangka teori yang telah disediakan: Dalam konteks konsep pemberdayaan, pernyataan Pokdarwis mencerminkan upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui industri pariwisata. Data yang disajikan tentang peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan

menggambarkan pertumbuhan industri pariwisata yang positif. Konsep ini sejalan dengan upaya memberikan kemampuan ekonomi kepada masyarakat melalui peluang pekerjaan dan pelibatan dalam aktivitas pariwisata.

Konsep desa juga tergambar dalam pernyataan Pokdarwis, di mana mereka berupaya untuk mempertahankan keasrian lingkungan sekitar lokasi wisata. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya dan lingkungan desa, yang sesuai dengan konsep desa sebagai entitas yang menjaga identitas dan keberlanjutan lokal. Dalam konteks konsep pariwisata, pernyataan Pokdarwis membahas manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Peningkatan pengunjung dan pendapatan mengindikasikan kontribusi positif pariwisata terhadap perekonomian desa. Pernyataan ini juga menggambarkan bagaimana pariwisata dapat menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat, seperti juru parkir dan penjaga. Hal ini sejalan dengan konsep pariwisata sebagai sumber potensial lapangan pekerjaan dan penghasilan. Keseluruhan pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana upaya pengelola wisata dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui industri pariwisata. Konsep pemberdayaan, desa, dan pariwisata saling terintegrasi dalam pernyataan tersebut, di mana pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan berjalan seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata. Pernyataan tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana industri pariwisata diintegrasikan ke dalam

kehidupan dan pembangunan masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Dalam wawancara lebih lanjut dengan Dahlia, ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) tentu saja mas, manfaat bagi kami adalah perputaran ekonomi. Dulu sebelum ada, kami tidak bisa menjual barang-barang yang kami buat seperti kerajinan tangan, juga kami dapat membuat waruung di sekitaran tempat wisata sehingga pendapatan kami stabil, tetapi permasalahannya, tidak semua masyarakat mendapatkan hal yang sama, kan pariwiwsata ini tidak melibatkan seluruh masyarakat dusun sendang, jadi ke depan kami berharap agar pemerintah melibatkan semua masyarakat sehingga kesejahteraan itu merata”

Dalam konteks konsep pemberdayaan, pernyataan masyarakat menyoroti dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pariwisata. Masyarakat menganggap bahwa manfaat utama dari pariwisata adalah perputaran ekonomi yang membantu mereka menjual produk-produk kerajinan tangan dan mendirikan warung di sekitar tempat wisata. Konsep ini menggambarkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui partisipasi dalam kegiatan pariwisata.

Pernyataan tersebut juga mencerminkan konsep masyarakat dan Kalurahan. Masyarakat di dalam Kalurahan diidentifikasi sebagai penerima manfaat langsung dari pariwisata. Namun, masyarakat juga mengungkapkan ketidakmerataan manfaat tersebut. Konsep ini mencerminkan perbedaan dalam partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata. Hal ini sejalan dengan konsep masyarakat sebagai entitas yang terdiri dari beragam individu dan kelompok dengan kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam konteks konsep

pariwisata, pernyataan masyarakat menyoroti pentingnya inklusi sosial dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat mengungkapkan harapan agar semua lapisan masyarakat di dusun Sendang bisa terlibat dalam manfaat pariwisata. Konsep ini menggambarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi manfaat pariwisata, serta upaya untuk mengatasi ketidakmerataan dalam dampak positifnya. Secara keseluruhan, pernyataan masyarakat menyoroti bagaimana perputaran ekonomi menjadi manfaat utama dari pariwisata bagi mereka. Namun, mereka juga menyadari adanya ketidakmerataan dalam distribusi manfaat tersebut. Pernyataan ini mencerminkan bagaimana industri pariwisata, meskipun memberikan dampak positif ekonomi, juga menghadirkan tantangan dalam memastikan bahwa manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan adil dan merata.

Dalam wawancara mendalam dengan Jarwadi Miswanto sebagai Ketua RT, ia menegaskan bahwa:

“(Wawancara 20 Juli 2023) kalau soal manfaat yah kami senang karena dengan adanya wisata pinus Pengger ini, barang dagangan Masyarakat bisa terjual, anak saya juga bisa bekerja sebagai juru parkir, teman-teman lain juga begitu. Selama ini pengelolaannya semua sudah baik. Kami merasa senang karena pengunjung selalu banyak kecuali waktu covid-19 yah itu pendapatan kami sangat merosot bahkan tidak ada pengunjung sama sekali”

Pernyataan ini mencerminkan konsep manfaat pariwisata bagi masyarakat dalam hal ekonomi. Masyarakat mengungkapkan kegembiraan mereka karena dampak positif dari wisata Pinus Pengger terhadap usaha dagangan mereka. Mereka menyebut bahwa barang dagangan mereka dapat terjual dengan lebih baik karena adanya wisata tersebut. Ini

menunjukkan bagaimana pariwisata bisa berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pasar dan peluang usaha. Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan konsep peran pengelolaan pariwisata. Masyarakat menyebut bahwa pengelolaan wisata tersebut sudah baik, dan mereka merasa terbantu dengan adanya pengontrolan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan. Konsep ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pariwisata untuk memastikan pengelolaan yang transparan, terorganisir, dan berkelanjutan.

Pandangan masyarakat terhadap dampak COVID-19 juga mencerminkan konsep pentingnya keterkaitan industri pariwisata dengan faktor-faktor eksternal. Pernyataan ini menggarisbawahi bagaimana industri pariwisata sangat rentan terhadap perubahan situasi global seperti pandemi. Dampak merosotnya pendapatan selama masa pandemi menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak terduga dan pentingnya upaya untuk memitigasi risiko dalam industri pariwisata. Secara keseluruhan, pernyataan masyarakat ini menggambarkan bagaimana wisata pinus Pengger memberikan manfaat ekonomi bagi mereka melalui peningkatan penjualan barang dagangan dan peluang kerja, serta menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang baik dan perhatian terhadap faktor eksternal seperti pandemi.

Lebih lanjut wawancara mendalam dengan Ibu Vina Aryani ia mengatakan bahwa:

“(Wawancara 17 Juli 2023) tentu saja mas penilaian masyarakat beda-beda mas, ada yang protes karena tidak mendapatkan

lapangan pekerjaan, ada juga yang protes karena pengelolaannya tidak melibatkan masyarakat dan masih banyak lagi, tetapi tujuan kita bukan untuk langsung memenuhi semuanya, tetapi setidaknya pelan-pelan kita dapat memberikan masyarakat semua kesejahteraan, kan bukan hanya wisata saja, bisa usaha yang lain, tetapi wisata ini sangat berpotensi sehingga akan kita benahi kedepannya, begitu mas”

Pernyataan ini mencerminkan konsep kompleksitas dalam manfaat pariwisata bagi masyarakat. bahwa penilaian masyarakat terhadap manfaat pariwisata bisa berbeda-beda. Beberapa masyarakat mungkin merasa protes karena merasa tidak mendapatkan lapangan pekerjaan atau merasa tidak terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini mencerminkan bahwa manfaat pariwisata tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, dan beberapa kelompok masyarakat mungkin merasa kurang diuntungkan terlebih pasca pandemi Covid 19 wisata Pinus Pengger mengalami stagnasi wisata. Hal tersebut juga menggambarkan konsep tujuan jangka panjang dalam pembangunan pariwisata belum optimal. Carik mengatakan bahwa tujuan mereka bukanlah untuk langsung memenuhi semua kebutuhan dan protes masyarakat, tetapi untuk secara bertahap memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata harus diupayakan agar berkelanjutan dan berjalan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

meskipun ada berbagai protes dan masalah, mereka tetap akan terus membenahi wisata dan melihat potensi yang ada. Konsep ini mencerminkan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan upaya untuk terus meningkatkan manfaat pariwisata bagi masyarakat. Hal ini

juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata. Secara keseluruhan, pernyataan Carik tersebut menggambarkan bagaimana manfaat pariwisata bagi masyarakat bisa kompleks dan beragam, serta menggarisbawahi pentingnya tujuan jangka panjang, pengelolaan yang berkelanjutan, dan kerja sama dalam pembangunan pariwisata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di hutan pinus pengger di padukuhan Sendangsari, Desa Terong, Kecamatan Dlinggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta maka terdapat beberapa poin yang dapat menjadi kesimpulan yaitu pengelolaan pariwisata di desa Pinus Pengger menggambarkan pentingnya partisipasi berbagai elemen masyarakat yang beragam, termasuk Pemerintah Kalurahan, kelompok masyarakat (Pokdarwis), LSM, dan lembaga pendidikan terlebih saat ini Pokdarwis mengalami kondisi jalan ditempat. Kolaborasi antar lembaga ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mendukung pengelolaan pariwisata yang lebih baik.

Manfaat pariwisata bagi masyarakat menjadi inti program pengelolaan seperti pendapatan tambahan, lapangan pekerjaan, dan peluang usaha baru muncul sebagai hasil dari pengelolaan pariwisata. Namun, perlu belum cukup dalam mewujudkan manfaat secara merata di kalangan masyarakat. Sehingga dukungan aktif dari masyarakat menjadi landasan kuat dalam keberhasilan program. Melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan pariwisata, seperti tukang parkir dan penjaga lokasi wisata, serta memungkinkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, menjaga integritas.

Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata Hutan Pinus Pengger perlu ditata ulang karena mengalami stagnasi. Hal tersebut dilihat dengan proses pemberdayaan yang dilakukan mulai dari proses pengelolaan, proteksi terhadap hutan, dan aktivitas sosial ekonomi sudah berjalan namun mengalami titik jenuh ditengah maraknya wisata baru di Kapanewon Dlingo. sehingga yang harus menjadi perhatian pengelola adalah proses distribusi hasil wisata harus berdasarkan kosep keadilan. Sehingga aktivitas pengelolaan dan sosial ekonomi tidak hanya di Dusun Sendang Sari. Karena pada dasarnya wisata tersebut merupakan milik publik yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Maka peran Pemerintah Kalurahan harus maksimal dan terintegritas, dengan ini ketipangan-ketipangan secara ekonomi dan kecemburuan sosial dapat teratasi. Walaupun tidak semua masyarakat terlibat dalam pengelolaan wisata.

B. Saran

Dari hasil penilitan dan pembahasan yang peneliti uraikan, maka pada bagian ini peneliti akan berusaha untuk memberikan saran terkait dengan Pemeberdayaan masyarakat berabasi pariwisata sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kalurahan harus lebih maksimal terhadap program pengelolaan pariwisata dengan memberikan regulasi yang jelas dan mendukung bagi semua aktor terlibat; Fokus pada kebijakan yang

mendorong distribusi manfaat yang lebih merata di masyarakat dan memitigasi dampak negatif.

2. Kepada Pokdarwis pengelola wisata harus lebih inklusi dan melibatkan berbagai elemen masyarakat tanpa memandang dari dusun mana sehingga kolaborasi dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam manajemen pariwisata yang berkelanjutan; Tingkatkan transparansi dalam pengelolaan dan alokasi pendapatan pariwisata untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dapat maksimal.
3. Kepada Dinas Pariwisata: Perkuat program pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat dan aktor terkait dalam pengelolaan pariwisata, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dan lakukan evaluasi terkait pengelolaan wisata di Hutan Pinus Pengger.
4. Kepada Masyarakat: Terus dukung program pengelolaan pariwisata dengan aktif berpartisipasi dalam peran seperti tukang parkir atau penjaga lokasi wisata; Berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata, untuk menjaga integritas program.

Dengan menerapkan saran-saran ini, Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis, dinas pariwisata, dan masyarakat dapat bekerja bersama untuk memastikan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pihak terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bogdan, dan Taylor. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Putra Grafika. Jakarta.
- Esteberg Kristin. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*, Mc. Graw Hill. New York.
- Komariah, A. dan Satori, D. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung. Bandung Alfabeta.
- Lexy J Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong Lexy J. 1990. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Komariah, A & Satori, D. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Usman Husaini, dan P. S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Andi. Yogyakarta.
- Richar Itang, *Kontestasi Pengelolaan Hutan Lindung Dalam Konteks Pengembangan Ekowisata Pinus Pengger*, 2021, Hlm. 2-3 (Diakses pada 12 Agustus 2022)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1
- Alaslan, *Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa*, Journal Adbispower, 2022, Hlm. 102
- Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: QUADRANT.
- Murdiyanto. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

Peraturan-Peraturan

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No.10 Tahun 2019 Tentang Pariwisata

Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 tahun 2016 tentang Jasa Layanan Wisata di Kawasan RPH Mangunan

Peraturan Gubernur No. 5/2018 yang khusus membahas mengenai kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan perizinan pemanfaatan Taman Hutan Raya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata pinus pengger

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang hadirnya pengelolaan wisata pinus pengger oleh kelompok sadar wisata?
2. Mengapa wisata pinus pengger perlu dijaga dan dirawat sehingga penting dikelola dengan baik oleh masyarakat atau pengelola?
3. Bagaimana peran masyarakat ikut serta membantu menjalankan wisata pinus pengger?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan hadirnya Pokdarwis sebagai pengelola dibawah nawungan koperasi Notowono? Secara sosial ekonomi.
5. Bagaimana peran pelaku usaha dalam berperan dalam membangun wisata Pinus Pengger?
6. Apa saja langkah yang dilakukan oleh Pokdarwis dan koperasi Notowono dalam menjaga hutan pinus agar tetap lestari?
7. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dan Pokdarwis dalam menjaga dan mengembangkan wisata hutan Pinus Pengger?

B. Pemberdayaan berbasis komunitas lokal

1. Bagaimana pendapat bapak berdasarkan keadaan objektif masyarakat dalam melihat pengelolaan dan perkembangan wisata Pinus Pengger?
2. Apa dampak secara sosial ekonomi bagi masyarakat secara umum di Kelurahan Terong?

3. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan wisata hutan Pinus Pengger?
4. Bagaimana respon masyarakat Kelurahan Terong dengan adanya aktivitas wisata?
5. Bagaimana arah pembangunan dan pengembangan wisata hutan pinus pengger ole koperasi bersama Pokdarwis?
6. Siapa saja yang ikut bertanggung jawab dan mengelolaan dan pengembangan dibidang UMKM, Pemberdayaan dan pariwisata?
7. Apa saja program-program yang disepakati bersama dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata?
8. Bagaimana pengelola wistaa, Pokdarwis mengatasi kendala tersebut?

C. Kemanfaatan pengelolaan wisata pinus pengger di Kalurahan Terong

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu pengelola wisata dalam melihat pembangunan dan pengelolaan wisata pinus pengger?
2. Apa peran bapak/ibu sebagai pengelola wisata pinus pengger? Seperti apa aktivitis ekonomi di sekitar wisata?
3. Menurut bapak/ibu sesuai dengan visi dari Gubernur yaitu melaksanakan wisata yang berbasis lokal agar terberdaya. Perdayaan itu sangat penting. Bagaimana dengan potret praktek pemberdayaan saat ini khsususnya di Kelurahan Terong?
4. Menurut bapak/ibu hadirnya wisata pinus pengger membawa perubahan secarar sosial ekonomi?

5. Apa saja langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan untuk mendobrak pemberdayaan sebagai kunci sumber daya pembangunan?
6. Pemberdayaan seperti apa yang sudah dilaksanakan dalam hal ini pada bidang wisata?
7. Apakah Pemerintah Kelurahan sebagai poros pelaksana pemberdayaan sudah memberikan keberdayaan kepada masyarakat?

DOKUMENTASI PENELITIAN

	Foto Peneliti bersama Sekretaris Kelurahan di Kantor Kelurahan pada 17 Juli 2023
	Foto Peneliti bersama Suryadi dukuh Sendangsari, 17 Juli 2023
	Foto Peneliti bersama Pak Sumar salah satu pengelola di hutan pinus penger, 20 Juli 2023



Foto Peneliti bersama Pak Parno salah satu pengelola di Hutan Pinus Pengger, 18 Juli 2023



Foto Peneliti bersama Miswanto Ketua RT 03 di Padukuhan Sendangsari, 20 Juli 2023



Foto Peneliti bersama Daliah salah satu pengelola di Hutan Pinus Pengger, 20 Juli 2023

PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI A

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 488/I/U/2023

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Lamp. : 1 benda

Kepada Yth.
Kepala Dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo
Di
Bantul

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas skripsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial S1, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu Kepala Dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	Joan Ernesto Wairo
Nomor Mahasiswa	:	20510022
Program Studi	:	Pembangunan Sosial
Jenjang	:	Strata 1
No. Telp	:	+62 821-3485-1402
Keperluan	:	Melakukan Penelitian
Waktu	:	Bulan Juni 1/4 Agustus 2023
Lokasi	:	Dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta
Topik	:	Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Pariwisata Pinus Pengger di Dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta
Dosen Pembimbing	:	Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.

Untuk melakukan penelitian lapangan, sebagai bahan penyusunan skripsi.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Juni 2023

Ketua



SURAT TUGAS PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi B

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jln. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 281/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, memberikan tugas kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	:	Joan Ernesto Wairo
Nomor Mahasiswa	:	20510022
Program Studi	:	Pembangunan Sosial
Jenjang	:	Strata 1
No. Telp	:	+62 821-3485-1402
Keperluan	:	Melakukan Penelitian
Waktu	:	Bulan Juni s/d Agustus 2023
Lokasi	:	Dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta
Topik	:	Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Pariwisata Pinus Pengger di Dusun Sendangsari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta
Dosen Pembimbing	:	Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A.

Yogyakarta, 14 Juni 2023



Perhatian :
Setelah selesai melaksanakan penelitian
mohon surat tugas ini diserahkan kepada
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" Yogyakarta

Mengetahui :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat
Instansi tempat penelitian bahwa
mahasiswa tersebut diatas telah
melaksanakan wajib penelitian